

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kondisi keuangan daerah di masa lalu dilihat dengan melakukan analisis terhadap kinerja pelaksanaan APBD dan kondisi neraca keuangan daerah. Analisis kinerja keuangan masa lalu dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun kedepan, untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kemampuan daerah juga dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari sisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Secara umum pengelolaan keuangan daerah Kabupaten pemalang selama lima tahun sebelumnya disimpulkan tidak memiliki masalah yang berarti. Akan tetapi, pada tahun anggaran 2020, beberapa kinerja terindikasikan menurun yang disebabkan karena kondisi pandemic Covid-19, dimana target Pendapatan tidak tercapai disebabkan karena melemahnya perekonomian baik lokal maupun nasional. Disamping itu terjadinya pengalihan belanja untuk penanggulangan Covid19 juga memberikan andil untuk tidak tercapainya kinerja beberapa program strategis. Untuk lebih detail, penjelasan kinerja pelaksanaan APBD selama lima tahun yang lalu dijabarkan pada bagian berikut ini.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Sebelum tahun anggaran 2021, pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pemalang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sedangkan sejak tahun anggaran 2021, pengelolaan keuangan daerah menggunakan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan peraturan terbaru tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi aspek Pendapatan dan aspek Belanja, serta aspek Pembiayaan. Aspek Pendapatan meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Aspek Belanja diklasifikasikan dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Aspek Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Untuk itu, agar penjelasan kinerja pengelolaan keuangan daerah lima tahun lalu dapat disinkronisasi dengan proyeksi lima tahun mendatang, maka analisis kinerja pelaksanaan APBD untuk tahun 2016-2020 dikonversikan dengan menggunakan klasifikasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

3.1.1.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, dan Dana Desa) dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Hibah.

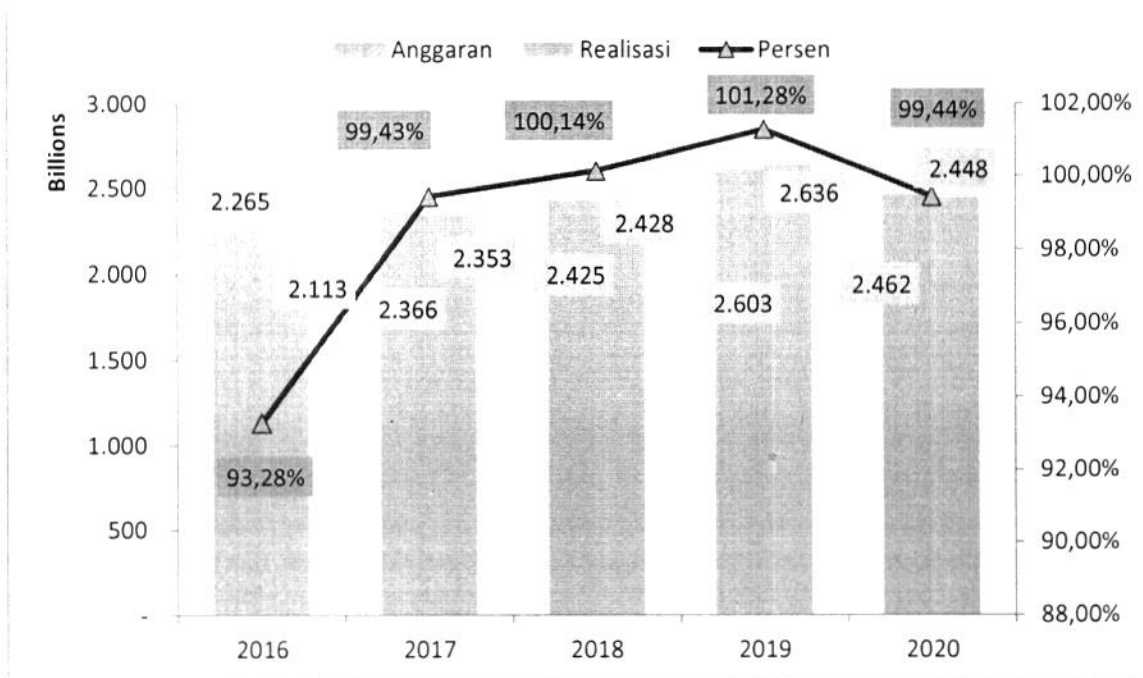
Selama lima tahun terakhir (2016-2020) Pendapatan Daerah tumbuh positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,76 persen per tahun. Pertumbuhan ini didorong oleh pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah rata-rata sebesar 4,49 persen, Pendapatan Transfer rata-rata sebesar 1,73 persen dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 105,76 persen. Rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1. Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
A	PENDAPATAN	2.112.514.280.374	2.353.030.274.957	2.428.263.885.703	2.636.036.843.851	2.448.328.954.562	3,76%
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	275.458.054.016	269.483.324.731	300.481.887.079	350.559.139.753	328.333.366.498	4,49%
a.	Pendapatan Pajak Daerah	45.544.391.390	64.270.887.023	76.107.419.624	87.622.428.980	80.569.759.532	15,33%
b.	Hasil Retribusi Daerah	26.074.275.115	27.884.961.093	29.878.293.305	39.652.661.431	31.386.762.911	4,75%
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	37.153.819.470	15.471.278.657	15.475.375.391	20.220.505.215	21.371.187.915	-1,37%
d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	166.685.568.041	161.856.197.958	179.020.798.759	203.063.544.127	195.005.656.140	4,00%
2	PENDAPATAN TRANSFER	1.828.008.148.518	1.918.137.008.107	1.977.832.998.624	2.132.625.584.098	1.957.807.388.064	1,73%
a.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	39.469.913.885	33.915.644.126	30.316.210.113	24.594.205.886	34.286.816.480	-3,46%
b.	Dana Alokasi Umum	1.197.916.501.000	1.176.872.960.000	1.180.834.332.000	1.223.060.205.000	1.118.791.154.000	-1,69%
c.	Dana Alokasi Khusus	270.426.675.208	343.530.726.398	331.768.131.456	350.820.964.140	325.279.262.051	4,73%
d.	Alokasi Dana Desa	149.607.350.000	191.002.083.000	249.322.556.000	301.814.036.000	327.255.484.000	21,61%

No	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
e.	Dana Insentif Daerah	0	0	4.500.000.000	46.648.038.000	10.639.878.000	24,00%
f.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	120.896.166.425	142.831.010.535	150.361.769.055	155.133.792.124	131.194.217.715	2,06%
g.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0
h.	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	49.691.542.000	29.984.584.048	30.730.000.000	30.554.342.948	10.360.575.818	-32,43%
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	9.048.077.840	165.409.942.119	149.949.000.000	152.852.120.000	162.188.200.000	105,76%
a.	Pendapatan Hibah	9.048.077.840	165.409.942.119	149.949.000.000	152.852.120.000	162.188.200.000	105,76%

Sumber: BPKAD Kabupaten Pemalang, 2021.

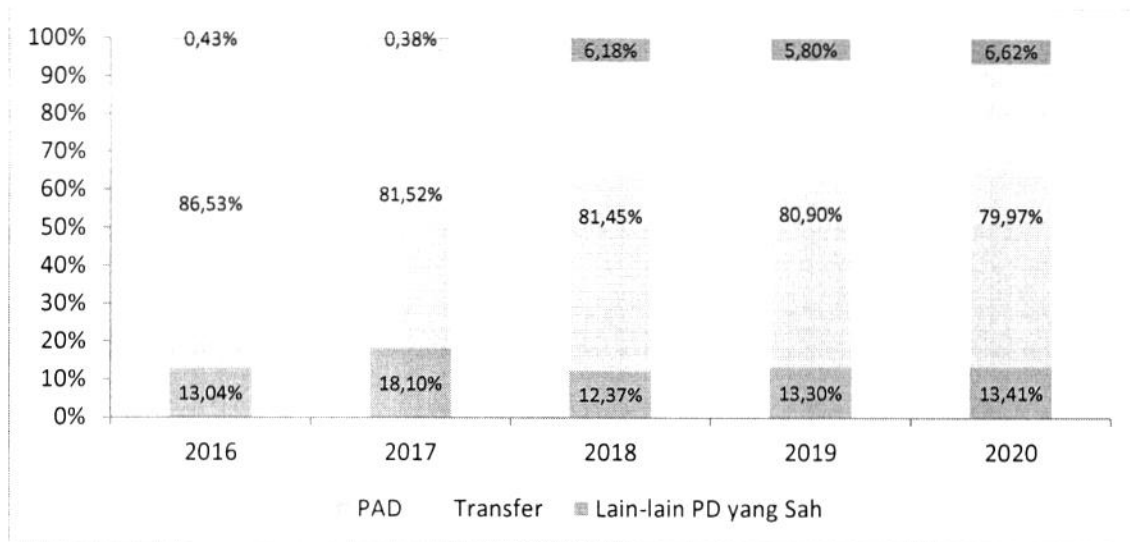


Gambar 3.1. Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2020

Tabel 3.2 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2016-2020

Tahun Anggaran	Anggaran	Realisasi	%	Bertambah/ (Berkurang)
2016	2.264.674.144.000	2.112.514.280.374	93,28%	- 152.159.863.626
2017	2.366.403.484.000	2.353.030.274.957	99,43%	- 13.373.209.043
2018	2.424.954.969.000	2.428.263.885.703	100,14%	3.308.916.703
2019	2.602.785.636.000	2.636.036.843.851	101,28%	33.251.207.851
2020	2.462.035.744.635	2.448.328.954.562	99,44%	- 13.706.790.073

Perbandingan antara anggaran dan realisasi Pendapatan Daerah ditunjukkan pada gambar dan tabel di atas. Berdasarkan realisasi pendapatan daerah selama kurun waktu 2016-2020, tingkat realisasi pendapatan daerah selalu meningkat bahkan melampaui target pada tahun 2018-2019. Akan tetapi pada tahun 2020, realisasi pendapatan tidak mencapai target disebabkan dampak pandemi. Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah per tahun sebesar 3,76 persen. Unsur pendapatan daerah masih didominasi oleh transfer dari pemerintah pusat, dengan rata-rata proporsi per tahun sebesar 74,93 persen, sebagaimana gambar berikut.



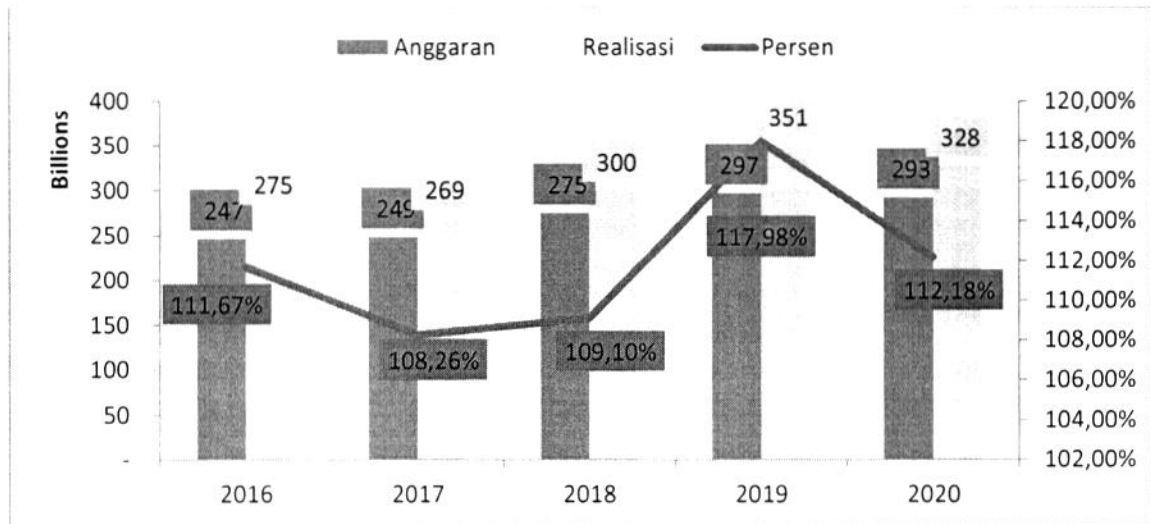
Gambar 3.2. Perkembangan Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2020

3.1.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam era otonomi daerah, PAD diharapkan menjadi pendorong utama bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik. Pendapatan Asli Daerah mencerminkan kemandirian daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin kecil tingkat ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat ke daerah.

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah ini tidak tinggi sehingga sampai saat ini belanja Kabupaten Pemalang masih ditopang oleh pendapatan transfer, terutama transfer dari pemerintah pusat. Tingkat kemandirian daerah, yang direpresentasikan oleh rasio kemandirian daerah (rasio antara pendapatan asli daerah dengan pendapatan transfer dari pemerintah pusat), selama tahun 2016-2020 berkisar antara 18,27 persen sampai 22,21 persen. Besaran rasio ini berada pada skala interval 0-25 persen sehingga dimaknai sebagai tingkat kemandirian daerah yang rendah sekali. Rasio desentralisasi fiskal, dicerminkan oleh rasio antara pendapatan asli daerah dengan total pendapatan daerah berkisar antara 13,04 persen sampai 13,41 persen, dikategorikan dalam kategori Kurang, karena berada pada interval 10,01-20,00 persen.

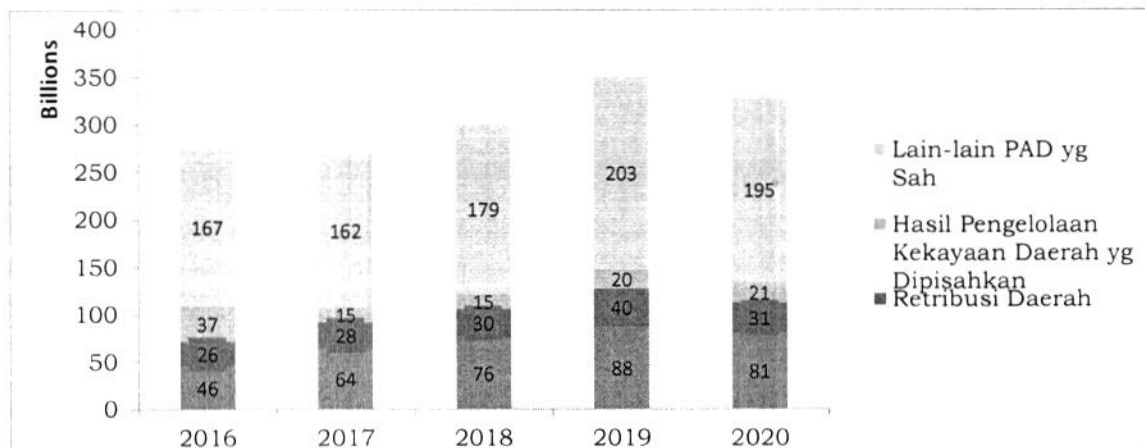
Peningkatan PAD merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah, karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, baik pelayanan publik (*public service function*), maupun pembangunan (*development function*). Kondisi PAD Kabupaten Pemalang ditampilkan pada gambar berikut:



Gambar 3.3. Perkembangan Realisasi PAD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2020

Dari gambar di atas terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalang tumbuh positif meningkat selama periode 2016-2020 dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 4,49 persen. Pada tahun 2016, penerimaan PAD sebesar Rp. 275.458.054.016,-, sedangkan di tahun 2020 sebesar Rp. 328.333.366.498,-.

Realisasi PAD Kabupaten Pemalang setiap tahun pada periode 2016-2020 berhasil melampaui target yang dianggarkan. Pada tahun 2016 realisasi melebihi 11,67 persen dari target anggaran, dan ini berlanjut ke tahun-tahun berikutnya, meskipun dengan porsi yang menurun di tahun 2017 (8,26 persen) dan tahun 2018 (9,10 persen). Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan penyumbang terbesar PAD dengan rata-rata proporsi per tahun sebesar 59,49 persen. Sementara itu untuk Pajak Daerah memiliki rata-rata kontribusi sebesar 23,05 persen, Retribusi Daerah 10,31 persen dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 7,33 persen. Proporsi PAD Kabupaten Pemalang ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 3.4 Proporsi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2020

f

Tabel 3.3 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
PENDAPATAN ASLI DAERAH					
Anggaran	246.679.817.000	248.923.988.881,00	275.431.369.000	297.127.162.000	292.672.718.000
Realisasi	275.458.054.016	269.483.324.731,00	300.481.887.079	350.559.139.753	328.333.366.498
Persen	111,67%	108,26%	109,10%	117,98%	112,18%
Pendapatan Pajak Daerah					
Anggaran	41.440.000.000	54.232.000.000	62.355.000.000	74.355.000.000	71.521.800.000
Realisasi	45.544.391.390	64.270.887.023	76.107.419.624	87.622.428.980	80.569.759.532
Persen	109,90%	118,51%	122,06%	117,84%	112,65%
Hasil Retribusi Daerah					
Anggaran	23.272.528.000	25.737.744.000	30.301.600.000	31.982.660.000	31.095.585.000
Realisasi	26.074.275.115	27.884.961.093	29.878.293.305	39.652.661.431	31.386.762.911
Persen	112,04%	108,34%	98,60%	123,98%	100,94%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan					
Anggaran	37.153.817.000	15.471.277.000	15.475.373.000	20.220.502.000	21.366.882.000

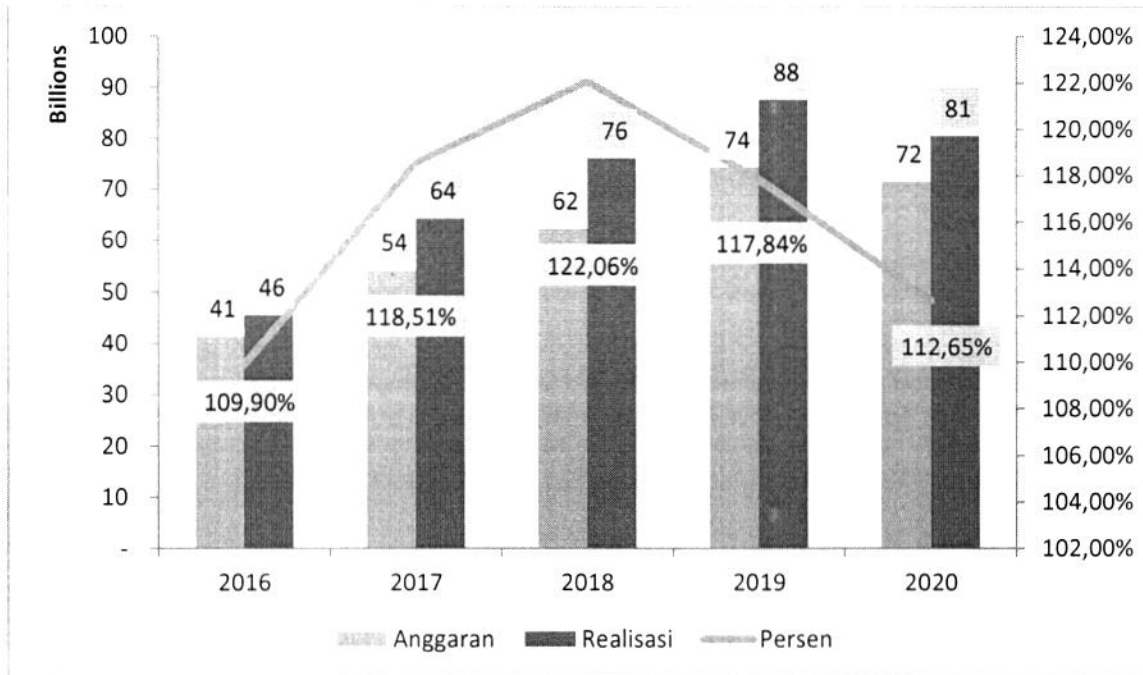
Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Realisasi	37.153.819.470	15.471.278.657	15.475.375.391	20.220.505.215	21.371.187.915
Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,02%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah					
Anggaran	144.813.472.000	153.482.967.881	167.299.396.000	170.569.000.000	168.688.451.000
Realisasi	166.685.568.041	161.856.197.958	179.020.798.759	203.063.544.127	195.005.656.140
Persen	115,10%	105,46%	107,01%	119,05%	115,60%

Dari data yang ada, selama kurun waktu 2016 - 2020 rata-rata persentase PAD terhadap total Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang berfluktuasi dan memiliki kecenderungan meningkat dengan rata-rata sebesar 12,72 persen. Ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Pemalang belum memperlihatkan kemandiriannya dan masih sangat bergantung pada bantuan dari Pusat untuk membiayai segala kewajiban terkait dengan pembangunan dan pemerintahan daerah. Secara rinci perbandingan PAD terhadap Pendapatan Daerah ditampilkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.4 Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2020

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Pendapatan Daerah (Rp)	% PAD terhadap Pendapatan Daerah
2016	275.458.054.016	2.112.514.280.374	13,04%
2017	269.284.324.731	2.353.030.274.957	11,45%
2018	300.481.887.079	2.428.263.885.703	12,37%
2019	350.559.139.753	2.636.036.843.851	13,30%
2020	328.333.366.498	2.448.328.954.562	13,41%
Rata-rata Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah			12,72%

Pajak daerah, merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat 11 obyek pajak daerah yang dikelola kabupaten yakni pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, mineral bukan logam dan batuan, parkir, air tanah, sarang burung walet, Pajak Bumi dan Bangunan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Selama periode 2016-2020 rata-rata proporsi pajak daerah terhadap penerimaan PAD per tahun sebesar 21,30 persen. Perkembangan pendapatan pajak daerah Kabupaten Pemalang selama 2016 sampai 2020 sebagai berikut:



Gambar 3.5 Perkembangan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2020

Selama periode 2016-2020, realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Pemalang mengalami peningkatan sebesar 76,90 persen dari Rp. 45.544.391.390,- di tahun 2016, meningkat menjadi menjadi Rp. 80.569.759.532,- di tahun 2020,-, dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 15,33 persen. Jika dilihat dari perbandingan anggaran dan realisasinya, penerimaan pajak daerah selalu melampaui target anggaran selama kurun waktu 2016-2020. Pada tahun 2016 pelampauan penerimaan pejak daerah sebesar 9,90 persen dan pencapai positif ini terus berlanjut di empat tahun berikutnya. Akan tetapi pada tahun 2020, pendapatan pajak mengalami penurunan akibat pandemi.

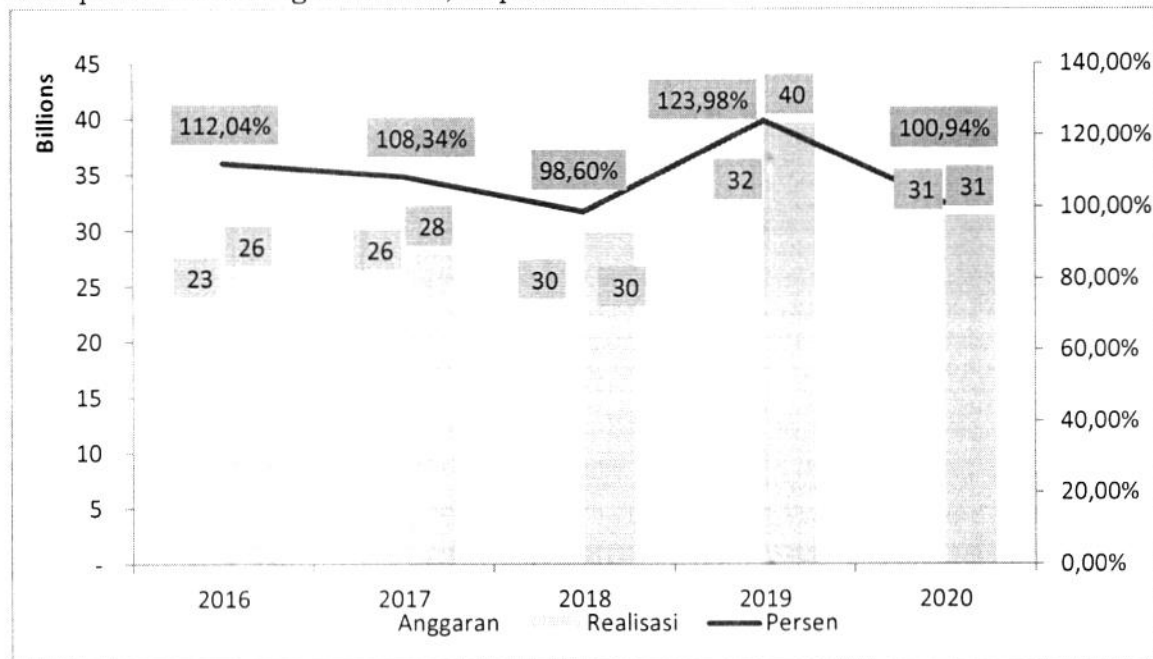
Penerimaan pajak daerah dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp.7,05 Miliar atau mengalami bertumbuh negatif 8,05 persen. Hal ini terjadi karena pandemi Covid-19 yang melanda sejak triwulan pertama tahun 2020. Kondisi tersebut telah menyebabkan menurunnya aktifitas ekonomi warga yang menjadi basis pengenaan pajak daerah seperti aktifitas perhotelan, restoran dan hiburan. Secara porsentase penurunan terbesar terjadi pada pajak hiburan yang mengalami penurunan sebesar 49,35%, sedangkan secara nominal (rupiah) penurunan terbesar secara berturut-turut terjadi pada penerimaan BPHTB menurun sebesar Rp.2,52 Miliar, disusul Pajak Penerangan Jalan yang menurun sebesar Rp.1,95 Miliar dan yang ketiga adalah Pajak Bumi dan Bangunan yang menurun sebesar 1.91 Miliar jika dibandingkan penerimaan tahun 2019. Penurunan BPHTB dikarenakan menurunnya jumlah transaksi peralihan hak atas tanah dan bangunan. Penurunan penerimaan pajak penerangan jalan terutama dikarenakan kebijakan pembebasan/pengurangan

pembayaran beban listrik golongan tertentu untuk mengurangi tekanan ekonomi masyarakat dampak Covid-19.

Retribusi daerah merupakan pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat kepada daerah atas pelayanan yang diterima secara langsung atau atas perizinan yang diperoleh. Antara lain retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan pemakaman, retribusi pelayanan parkir, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor dan lain-lain. Proporsi retribusi terhadap penerimaan PAD Kabupaten Pemalang relative kecil, yaitu sekitar 9,37 persen setiap tahun.

Penerimaan retribusi daerah berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat selama kurun waktu 2016 - 2020, dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 6,49 persen, yaitu sebesar Rp. 26.074.275.115,- di tahun 2016, menjadi Rp. 31.386.762.911,- di tahun 2020. Penerimaan retribusi daerah melampaui target di tahun 2016 sebesar 12,04 persen. Namun dalam perkembangan selama empat tahun berikutnya penerimaan retribusi daerah berfluktuasi. Fluktuasi tersebut terjadi di tahun 2018 dimana penerimaan retribusi hanya 98,60 persen dari target.

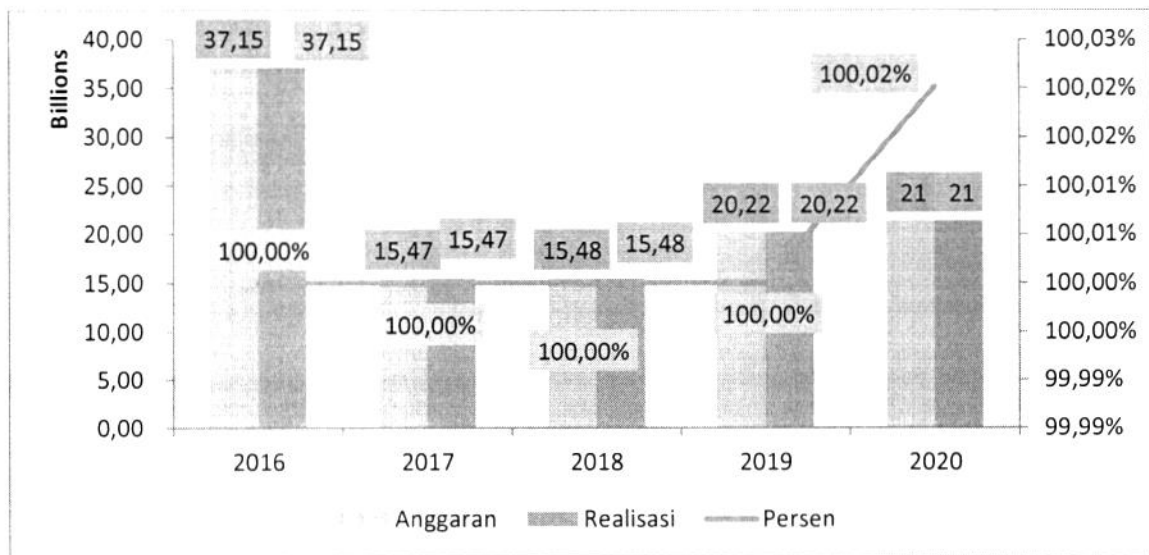
Pada tahun 2020, kendala yang sama dengan kasus pendapatan pajak dihadapi oleh pendapatan retribusi yang mengalami penurunan akibat pandemi yang menyebabkan beberapa obyek retribusi terdampak sehingga ikut menurunkan setoran retribusi. Penurunan tersebut berimbas pada realisasi pendapatan retribusi yang menurun dari Rp.39.652.661.431 pada tahun anggaran 2019 menjadi Rp.31.386.762.911 pada tahun anggaran 2020 atau menurun sebesar Rp.8.265.898.520. Pandemi telah membuat pendapatan retribusi Kabupaten Pemalang turun 20,85 persen.



Gambar 3.6 Perkembangan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2020

f

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain dari BPD, perusahaan daerah, dividen BPR-BKK dan penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga. Proporsi penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap PAD dalam jangka waktu 2016-2020 hanya sekitar 7,33 persen per tahun. Perkembangan penerimaan PAD dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan selama periode 2016 - 2020 menunjukkan tren penurunan dengan rata-rata penurunan per tahun sebesar 12,91 persen. Pada tahun 2016 penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp. 37.153.819.470,- dan mengalami penurunan di tahun 2017 menjadi sebesar Rp. 15.471.278.657,-. Akan tetapi selama tiga tahun berikutnya, realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan meningkat sehingga pada tahun 2020 menjadi Rp. 21.371.187.915 sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut.



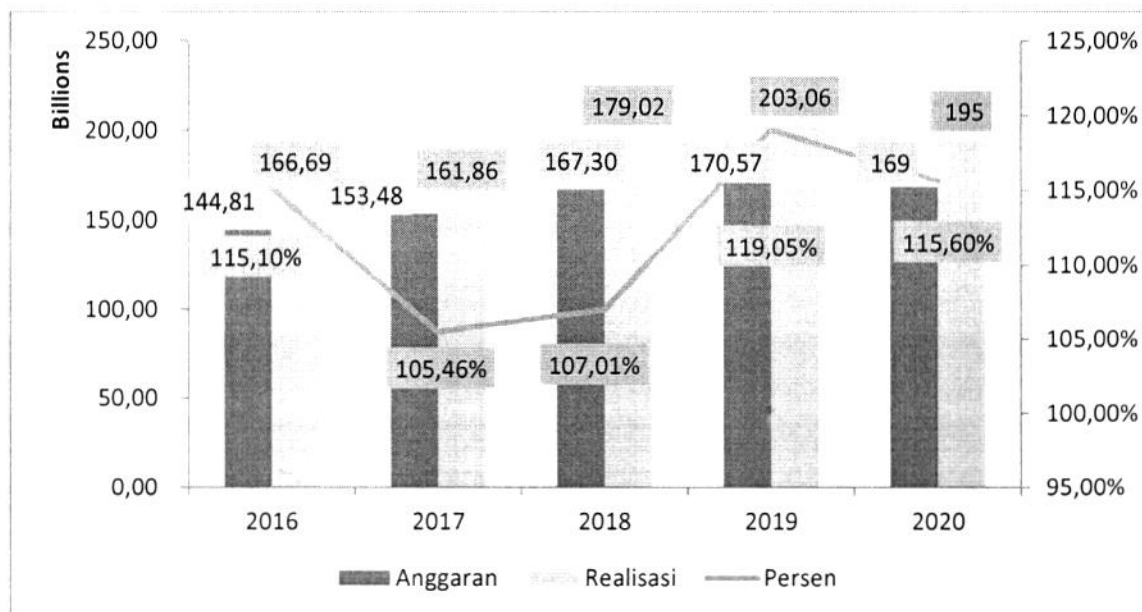
Gambar 3.7 Perkembangan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2020

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan; hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan; hasil kerja sama daerah; jasa giro; hasil pengelolaan dana bergulir; pendapatan bunga; penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah; penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah; penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; pendapatan denda pajak

daerah; pendapatan denda retribusi daerah; . pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; pendapatan dari pengembalian; pendapatan dari BLUD; dan pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selama periode 2016-2020, Lain-lain PAD yang Sah memiliki kontribusi paling tinggi terhadap penerimaan PAD yaitu rata-rata sebesar 59,49 persen per tahun. Pelampauan penerimaan dari Lain-lain PAD yang Sah pada tahun 2016 sebesar 15,10 persen dari target anggaran. Pelampauan ini terus terjadi pada empat tahun berikutnya meskipun persentasenya bervariasi. Perlakuan khusus terhadap pos Lain-lain PAD yang Sah tahun 2017 yaitu dengan mengeluarkan Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP dan BOS SD dan dimasukkan ke dalam pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga konsistensi pengkategorian jenis pendapatan dalam Lain-lain PAD yang Sah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Konsistensi ini diperlukan guna memudahkan perbandingan realisasi tahun 2017 dengan tahun lainnya dalam periode 2016-2020, memudahkan membuat proyeksi, juga memenuhi kriteria pendapatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Lain-lain PAD yang sah dimana hibah BOS SMP dan BOS SD terdapat di dalamnya dianggarkan sebesar Rp. 309.892.910.000 dengan realisasi sebesar Rp. 318.266.140.077. Setelah hibah BOS SMP dan BOS SD dikeluarkan, maka Lain-lain PAD yang Sah dianggarkan sebesar Rp. 153.482.967.881, dengan realisasi sebesar Rp. 161.856.197.958.

Perkembangan penerimaan dari pos Lain-lain PAD yang Sah di Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:



Gambar 3.8 Perkembangan Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2020

3.1.1.1.2. Pendapatan Transfer

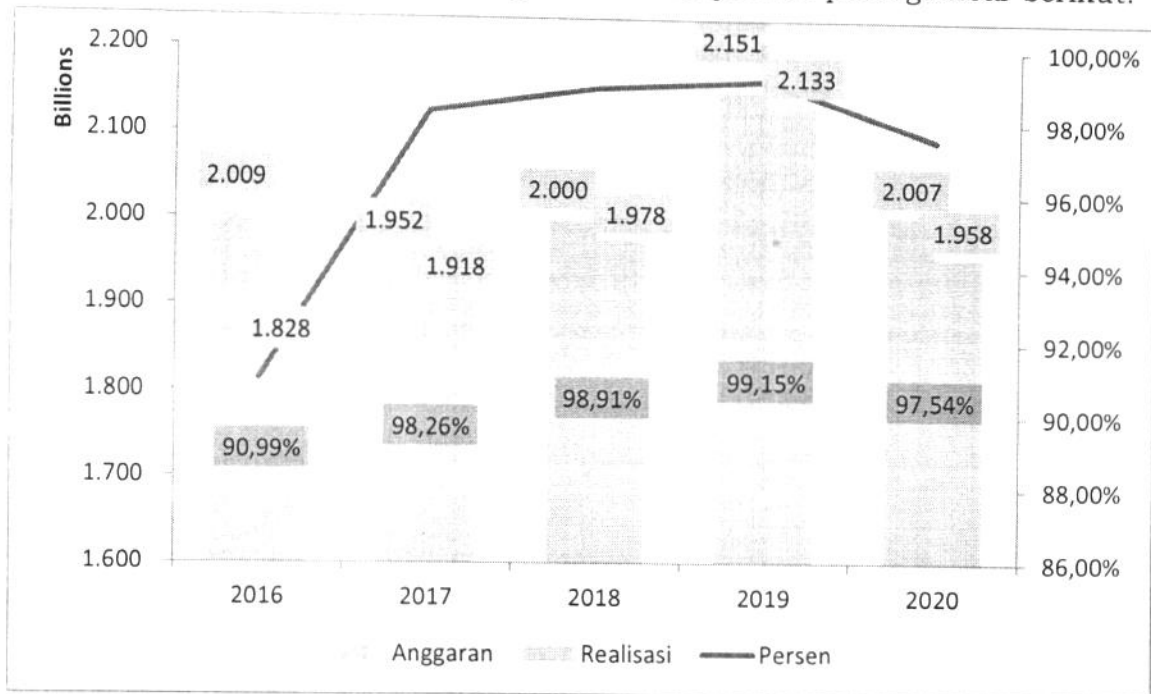
Dana transfer atau dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Pendapatan transfer meliputi transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar-daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas: dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa. Transfer antar-daerah terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.

Secara umum, pendapatan transfer Kabupaten Pemalang selama periode 2016-2020 tumbuh positif rata-rata sebesar 1,73 persen per tahun. Pada tahun 2016 pendapatan transfer sebesar Rp. 1.828.008.148.518,-. Pada tahun 2019 pendapatan transfer mengalami peningkatan cukup signifikan sebesar 7,83 persen atau sebesar Rp. 154.792.585.474,- dibanding tahun 2018. Hal tersebut disebabkan karena peningkatan penerimaan dari beberapa komponen, yaitu :

1. Penerimaan Dana Insentif Daerah sebesar Rp. 46.648.038.000,- atau meningkat sebesar 936,62% dibandingkan penerimaan tahun 2018 yang hanya Rp. 4.500.000.000,-. Penerimaan DID ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian APBN Tahun 2019, dimana Alokasi DID diberikan kepada daerah sebagai penghargaan atas perbaikan kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat, dengan kriteria utama mendapatkan opini BPK atas LKPD minimal WTP, penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD yang tepat waktu dan penggunaan *e-government* dalam pengadaan barang dan jasa (*e-procurement*).
2. Penerimaan Dana Desa sebesar Rp. 301.814.036.000,- atau meningkat sebesar 21,05% dibandingkan penerimaan tahun 2018 yang hanya Rp. 249.322.556.000,- yang dialokasikan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat desa.
3. Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 350.820.964.140,- atau meningkat sebesar 5,74% dibandingkan penerimaan tahun 2018 yang hanya Rp. 331.768.131.456,-.
4. Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 1.223.060.205.000,- atau meningkat sebesar 3,58% dibandingkan penerimaan tahun 2018 yang hanya Rp. 1.180.834.332.000,-. Peningkatan pagu DAU pada tahun 2019 dikarenakan adanya alokasi DAU Tambahan yang dialokasikan sebagai stimulan alokasi anggaran kelurahan untuk 11 kelurahan guna mendanai pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat yang besarnya paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh 211 desa di Kabupaten Pemalang.

Realisasi pendapatan transfer selama 5 (lima) tahun tidak sesuai dengan target yang direncanakan. Pada tahun 2016 kurang dari target sebesar 9,01 persen. Capaian ini berlanjut selama empat tahun berikutnya. Sedangkan ketika terjadi penurunan di tahun 2020 hal itu disebabkan karena kebijakan

pengurangan dana transfer karena menghadapi Covid-19. Perkembangan realisasi pendapatan transfer sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 3.9 Perkembangan Realisasi Penerimaan Pendapatan Transfer Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2020

Tabel 3.5 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Transfer Kabupaten Pemalang tahun 2016-2020

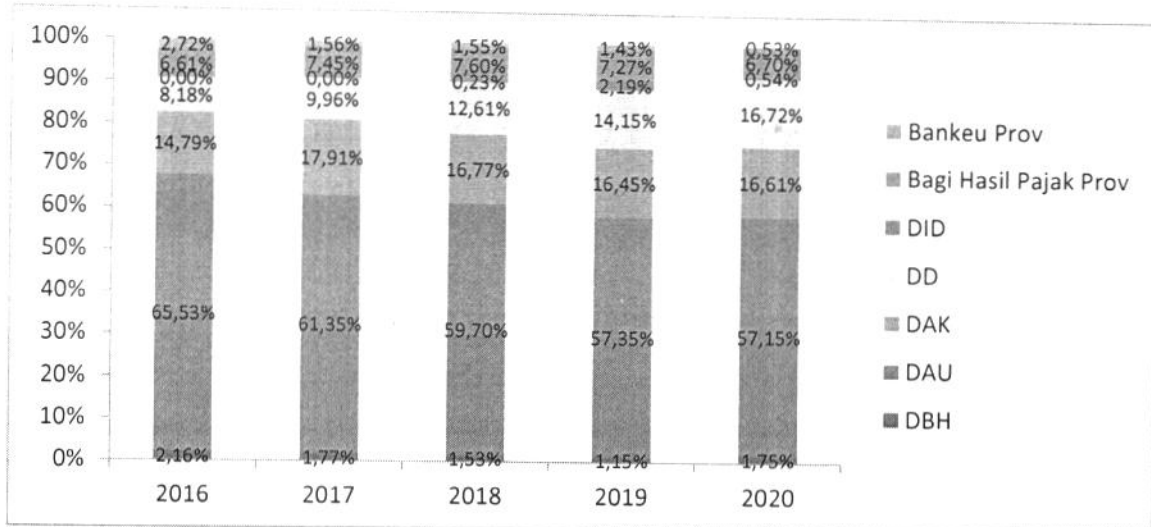
Tahun Anggaran	Anggaran	Realisasi	%	Bertambah/(Berkurang)
2016	2.008.919.172.000	1.828.008.148.518	90,99%	-180.911.023.482
2017	1.952.009.553.000	1.918.137.008.107	98,26%	-33.872.544.893
2018	1.999.574.600.000	1.977.832.998.624	98,91%	-21.741.601.376
2019	2.150.856.882.000	2.132.625.584.098	99,15%	-18.231.297.902
2020	2.007.094.187.635	1.957.807.388.064	97,54%	-49.286.799.571

Proporsi Pendaatapan Transfer tiga terbesar yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), diikuti oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana desa (DD. Lebih lanjut rincian penerimaan pendapatan transfer ditampilkan dalam tabel dan gambar berikut.

f

Tabel 3.6 Pendapatan Transfer Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2020

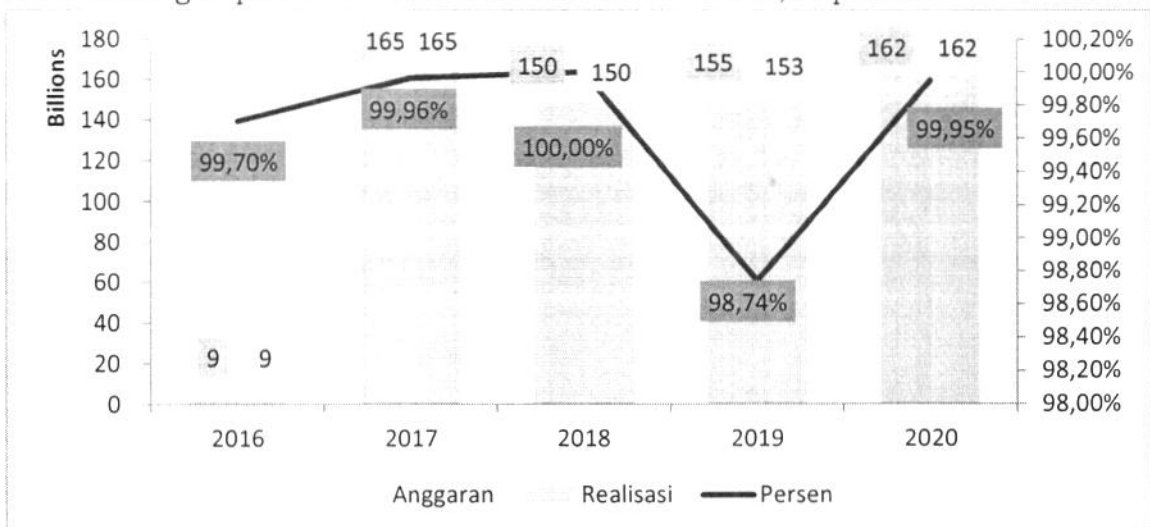
Tahun	Pendapatan Transfer	Transfer Pemerintah Pusat						Transfer Antar Daerah	
		DBH Pajak/Bukan Pajak	DAU	DAK	Dana Desa	DID	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Bantuan Keuangan dari Pemda Prov	
2016	1.828.008.148.518	39.469.913.885	1.197.916.501.000	270.426.675.208	149.607.350.000	0	120.896.166.425	49.691.542.000	
2017	1.918.137.008.107	33.915.644.126	1.176.872.960.000	343.530.726.398	191.002.083.000	0	142.831.010.535	29.984.584.048	
2018	1.977.832.998.624	30.316.210.113	1.180.834.332.000	331.768.131.456	249.322.556.000	4.500.000.000	150.361.769.055	30.730.000.000	
2019	2.132.625.584.098	24.594.205.886	1.223.060.205.000	350.820.964.140	301.814.036.000	46.648.038.000	155.133.792.124	30.554.342.948	
2020	1.957.807.388.064	34.286.816.480	1.118.791.154.000	325.279.262.051	327.255.484.000	10.639.878.000	131.194.217.715	10.360.575.818	



Gambar 3.10 Proporsi Pendapatan Transfer Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2020

3.1.1.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2016 penerimaan daerah dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tercatat sebesar Rp. 9.048.077.840,- Pada tahun tersebut Pemerintah Kabupaten Pemalang tidak mendapat hibah dana BOS SMP dan BOS SD. Hibah BOS SMP dan BOS SD mulai diterima pada tahun 2017 sehingga penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meningkat tajam di menjadi Rp. 165.469.942.119,-. Penerimaan hibah BOS SMP dan BOS SD ini terus berlanjut pada tiga tahun berikutnya. Selama kurun waktu 2018-2020 penerimaan daerah dari lain-lain pendapatan daerah yang sah menunjukkan kecenderungan penurunan rata-rata sebesar minus 0,26 persen.



Gambar 3.11 Perkembangan Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2020

Tabel 3.7 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2020

Tahun Anggaran	Anggaran	Realisasi	%	Bertambah/(Berkurang)
2016	9.075.155.000	9.048.077.840	99,70%	- 27.077.160
2017	165.469.942.119	165.409.942.119	99,96%	- 60.000.000
2018	149.949.000.000	149.949.000.000	100,00%	-
2019	154.801.592.000	152.852.120.000	98,74%	- 1.949.472.000
2020	162.268.839.000	162.188.200.000	99,95%	- 80.639.000

3.1.1.1.4. Analisis Rasio Pendapatan Daerah

Analisis rasio keuangan merupakan perbandingan antara dua angka yang datanya diambil dari elemen laporan keuangan. Analisis ini dapat digunakan untuk menginterpretasikan perkembangan kinerja pendapatan dari tahun ke tahun dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis. Dalam kajian ini digunakan rasio kemandirian daerah dan derajat desentralisasi.

Tabel 3.8 Perkembangan Rasio Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2020

Analisis	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	15,07%	14,05%	15,19%	16,44%	16,77%
Rasio Desentralisasi Fiskal	13,04%	11,45%	12,37%	13,30%	13,41%

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan pendapatan daerah yang berasal dari bantuan pemerintah pusat dan atau pinjaman lain. Tabel diatas menunjukkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Pemalang rendah sekali. Selama 5 tahun, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berada di kisaran 14,05 - 16,77 persen. Atau rata-rata per tahun sebesar 15,50 persen. Kondisi ini mempunyai arti bahwa tingkat ketergantungan kabupaten terhadap bantuan pemerintah pusat sangat tinggi. Dengan demikian pola hubungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan

Pemerintah Pusat bersifat instruktif, yaitu peran Pemerintah Pusat lebih dominan daripada kemandirian daerah.

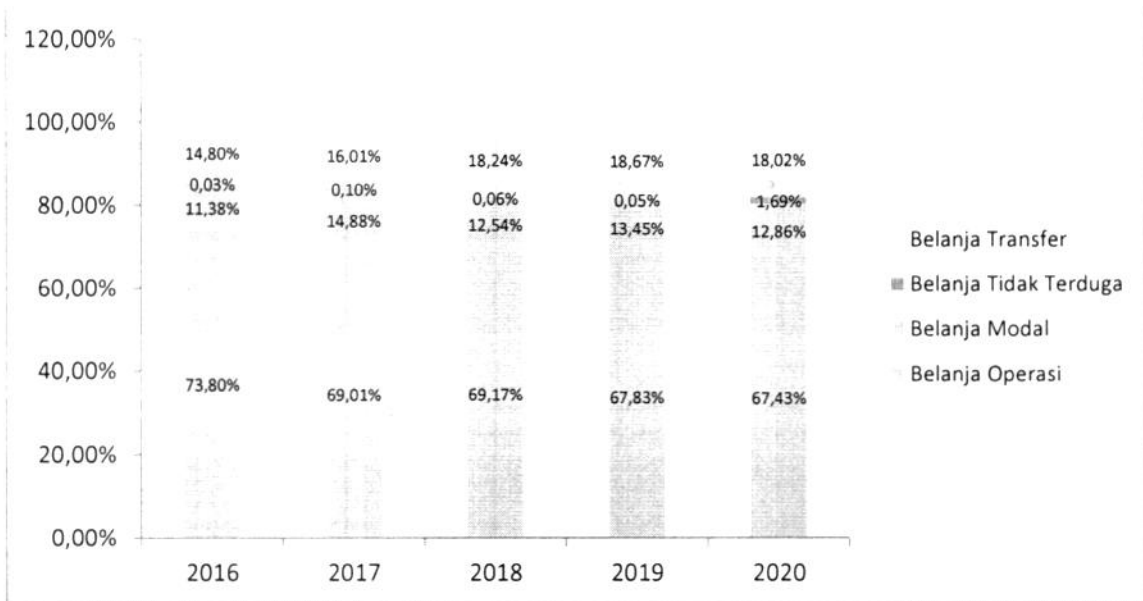
2. Rasio Desentralisasi Fiskal

Rasio Desentralisasi fiskal menunjukkan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola pendapatan. Rasio desentralisasi fiskal diukur dengan membandingkan total pendapatan asli daerah dengan total pendapatan daerah. Tabel diatas menunjukkan Rasio Desentralisasi Fiskal Kabupaten Pemalang rendah sekali. Dalam jangka 2016–2020, rasio selalu berkisar 11,45 - 13,41 persen, atau rata-rata per tahun sebesar 12,72 persen. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Dengan demikian Kabupaten Pemalang dinilai belum mencapai penyelenggaraan desentralisasi fiskal dengan baik.

3.1.1.2. Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebaia pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah darah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan Daerah. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah.

Dalam struktur APBD, belaja daerah diklasifikasikan dalam belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja Operasi antara lain terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Belanja modal dirinci atas jenis belanja modal. Belanja tidak terduga dirinci atas jenis belanja tidak terduga. Belanja transfer terdiri dari belanja bagi hasil, dan belanja bantuan keuangan. Komposisi belanja daerah Pemerintah Kabupaten Pemalang, selama periode 2016-2020 didominasi oleh belanja operasi dengan rata-rata proporsi per tahun sebesar 69,45 persen, belanja transfer 17,15 persen, belanja modal 13,02 persen dan belanja tak terduga 0,38 persen. Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Pemalang tersebut secara lengkap ditampilkan pada Gambar 3.12 dan Tabel 3.9 berikut.



Gambar 3.12 Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2020

Realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu 2016-2020 mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 5,35 persen per tahun. Total belanja daerah di tahun 2016 sebesar Rp. 2.163.136.735.963,- sedangkan di tahun 2020 meningkat menjadi Rp. 2.664.296.658.725,-. Peningkatan belanja daerah ini didorong secara bersamaan oleh peningkatan belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Selama jangka waktu 2016-2020 belanja operasi meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3 persen per tahun. Belanja modal meningkat dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 8,62 persen. Sementara pada pos belanja tidak terduga mengalami peningkatan ekstrim di tahun 2020 karena kebijakan penanganan pandemic Covid-19. Kebijakan tersebut ditempuh melalui *refocussing* dan realokasi belanja Belanja Operasi dan Belanja Modal ke Belanja Tidak Terduga. Penggunaan Belanja Tidak Terduga tersebut untuk penanggulangan pandemic Covid-19 dari tiga sisi, yaitu penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penyediaan *social safety net*. Belanja transfer meningkat selama periode 2016-2020 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10,67 persen per tahun. Selengkapnya data realisasi Belanja Daerah tahun 2016-2020 ditampilkan dalam tabel 3.10 berikut.

f

Tabel 3.9 Proporsi Jenis Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2020

Uraian	Realisasi				
	2016	2017	2018	2019	2020
Belanja Daerah	2.163.136.735.963	2.258.339.872.920	2.324.288.798.012	2.584.470.869.519	2.664.296.658.725
Belanja Operasi	1.596.367.882.331	1.558.479.332.453	1.607.665.530.348	1.753.024.417.372	1.796.611.175.204
Persen	73,80%	69,01%	69,17%	67,83%	67,43%
Belanja Modal	246.080.497.261	336.088.968.940	291.381.937.258	347.657.852.647	342.593.987.691
Persen	11,38%	14,88%	12,54%	13,45%	12,86%
Belanja Tak terduga	599.700.000	2.262.214.045	1.280.486.906	1.362.500.000	44.928.357.830
Persen	0,03%	0,10%	0,06%	0,05%	1,69%
Belanja Transfer	320.088.656.371	361.509.357.482	423.960.843.500	482.426.099.500	480.163.138.000
Persen	14,80%	16,01%	18,24%	18,67%	18,02%

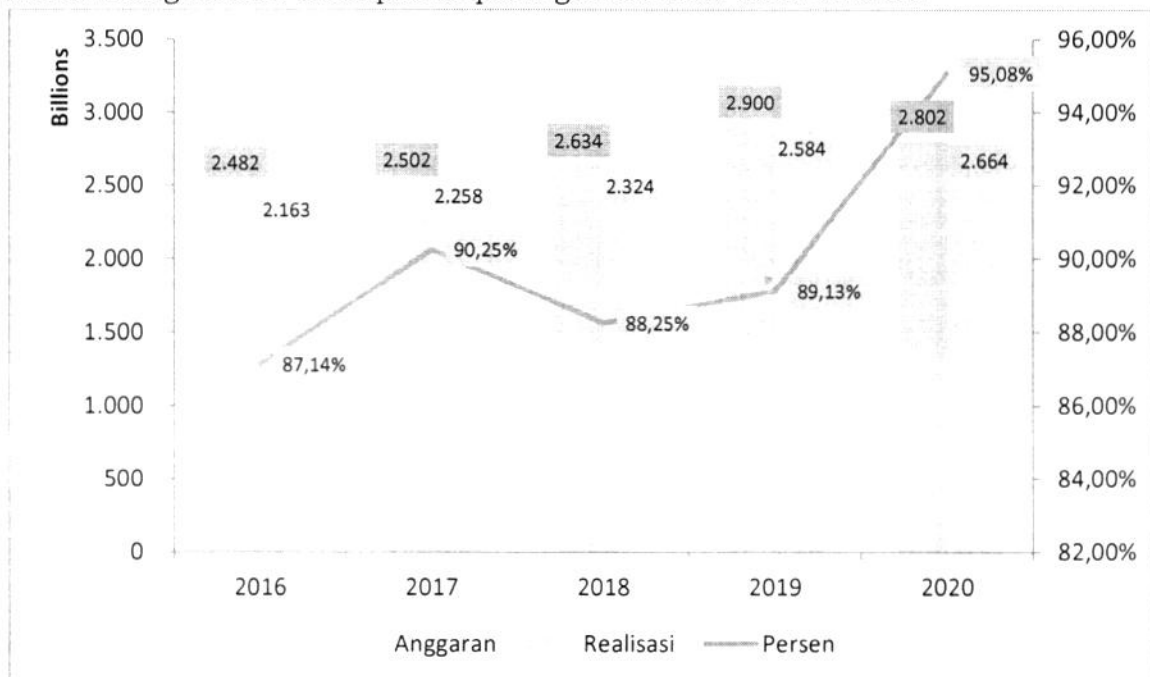
Tabel 3.10 Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 - 2020

NO URUT	URAIAN	REALISASI 2016	REALISASI 2017	REALISASI 2018	REALISASI 2019	REALISASI 2020	Rata-rata Pertumbuhan
B	BELANJA	2.163.136.735.963	2.258.339.872.920	2.324.288.798.012	2.584.470.869.519	2.664.296.658.725	5,35%
I	BELANJA OPERASI	1.596.367.882.331	1.558.479.332.453	1.607.665.530.348	1.753.024.417.372	1.796.611.175.204	3,00%
a	Belanja Pegawai	1.133.211.267.192	1.075.327.539.055	1.075.400.935.249	1.109.972.944.894	1.129.022.379.192	-0,09%

NO URUT	URAIAN	REALISASI 2016	REALISASI 2017	REALISASI 2018	REALISASI 2019	REALISASI 2020	Rata-rata Pertumbuhan
b	Belanja Barang	410.135.051.496	457.928.343.398	500.092.645.099	583.864.222.478	552.336.992.012	7,73%
c	Belanja Bunga	14.330.850	0	0	0	0	-100,00%
d	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0,00%
e	Belanja Hibah	47.030.617.043	22.684.800.000	27.141.800.000	55.674.250.000	111.212.329.000	24,01%
f	Belanja Bantuan Sosial	5.976.615.750	2.538.650.000	5.030.150.000	3.513.000.000	4.039.475.000	-9,33%
2	BELANJA MODAL	246.080.497.261	336.088.968.940	291.381.937.258	347.657.852.647	342.593.987.691	8,62%
a	Belanja Tanah	1.392.393.450	11.884.647.920	0	2.284.447.918	547.159.229	19,57%
b	Belanja Peralatan dan Mesin	61.826.740.863	57.680.231.826	61.108.708.812	73.396.610.195	66.655.036.324	1,90%
c	Belanja Bangunan dan Gedung	88.997.526.329	144.210.358.951	159.232.219.548	166.805.244.495	222.354.769.440	25,72%
d	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	85.302.120.264	94.178.467.430	45.197.745.443	83.135.501.101	32.026.519.797	-21,72%
e	Belanja Aset Tetap Lainnya	8.561.716.355	28.135.262.813	25.843.263.455	22.036.048.938	20.291.661.621	24,08%
f	Belanja Aset Lainnya	0	0	0	0	718.841.280	0,00%
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	599.700.000	2.262.214.045	1.280.486.906	1.362.500.000	44.928.357.830	194,20%

NO URUT	URAIAN	REALISASI 2016	REALISASI 2017	REALISASI 2018	REALISASI 2019	REALISASI 2020	Rata-rata Pertumbuhan
a	Belanja Tak Terduga	599.700.000	2.262.214.045	1.280.486.906	1.362.500.000	44.928.357.830	194,20%
4	BELANJA TRANSFER	320.088.656.371	361.509.357.482	423.960.843.500	482.426.099.500	480.163.138.000	10,67%
a	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	4.256.365.204	7.128.202.482	9.265.660.000	9.846.766.000	10.261.739.000	24,61%
(1)	Bagi Hasil Pajak Daerah	3.731.531.001	4.554.438.977	6.235.500.000	6.735.500.000	7.152.180.000	17,66%
(2)	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	524.834.203	2.573.763.505	3.030.160.000	3.111.266.000	3.109.559.000	56,02%
b	Transfer Bantuan Keuangan	315.832.291.167	354.381.155.000	414.695.183.500	472.579.333.500	469.901.399.000	10,44%
(1)	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemda Lainnya			500.000.000	0	0	0,00%
(2)	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	315.141.062.840	353.471.993.000	413.251.676.000	471.670.486.000	468.967.484.000	10,45%
(3)	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	691.228.327	909.162.000	943.507.500	908.847.500	933.915.000	7,81%

Apabila dibandingkan dengan target anggaran, maka rata-rata tingkat realisasi belanja daerah selama periode 2016-2020 sebesar 89,97 persen per tahun sebagaimana ditampilkan pada gambar dan tabel berikut.



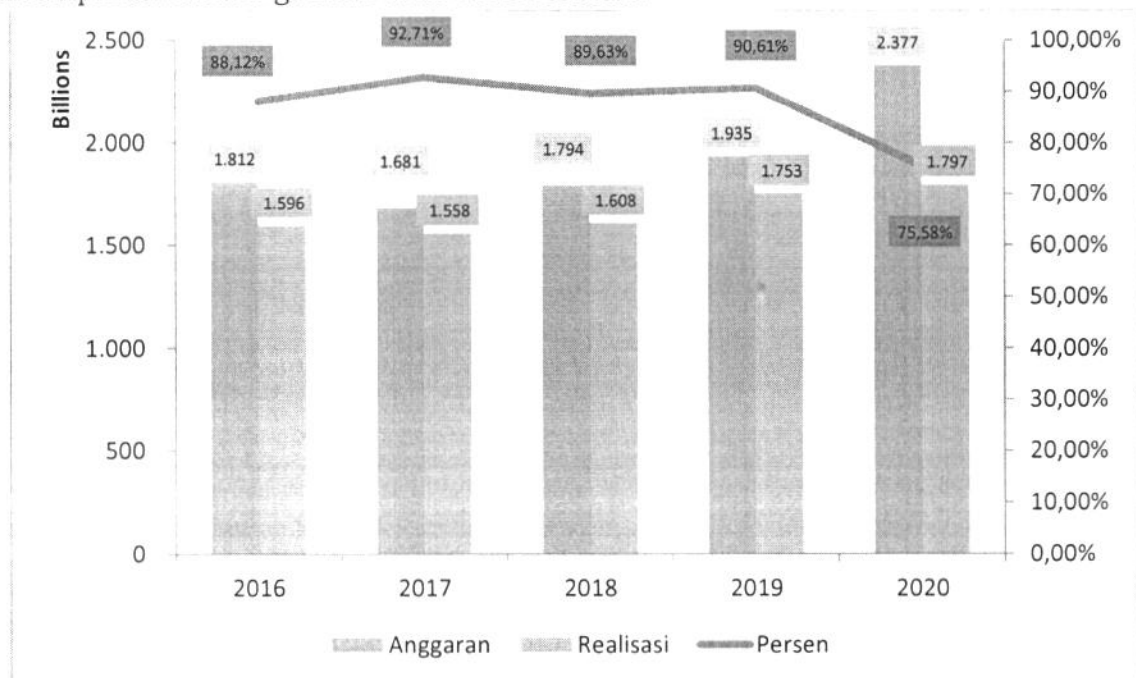
Gambar 14. Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2020

Tabel 3.11 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2020

Tahun Anggaran	Anggaran	Realisasi	%	Bertambah / (Berkurang)
2016	2.482.456.475.000	2.163.136.735.963	87,14%	- 319.319.739.037
2017	2.502.244.546.000	2.258.339.872.920	90,25%	- 243.904.673.080
2018	2.633.780.980.000	2.324.288.798.012	88,25%	- 309.492.181.988
2019	2.899.727.628.000	2.584.470.869.519	89,13%	- 315.256.758.481
2020	2.802.092.060.635	2.664.296.658.725	95,08%	- 137.795.401.910

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Antara lain terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial. Dalam kurun waktu 2016-2020 Belanja operasi rata-rata tumbuh sebesar 3 persen per tahun. Pada tahun 2016 realisasi belanja operasi sebesar Rp. 1.596.367.882.331,- meningkat menjadi Rp.1.796.611.175.2014 di tahun 2020. Pertumbuhan belanja operasi tersebut didorong oleh pertumbuhan belanja barang, belanja hibah dan belanja bantuan

sosial. Sementara belanja pegawai dan belanja bunga mengalami pertumbuhan yang negative. Belanja pegawai mengalami penurunan karena banyaknya pegawai yang purna tugas dan belum ada penggantinya. Proporsi belanja operasi dalam komposisi belanja daerah selama periode 2016-2020 berada pada kisaran 67 - 74 persen, dengan rata-rata proporsi per tahun sebesar 69,45 persen. Realisasi belanja operasi berfluktuasi setiap tahun dengan rata-rata berkisar 87,33 persen per tahun. Pada tahun 2020, realisasi persentase belanja operasi menurun tajam akibat menurunnya realisasi belanja pegawai dan pembatasan perjalanan sehingga mempengaruhi realisasi belanja barang dan jasa. Selengkapnya ditampilkan dalam gambar dan tabel berikut:

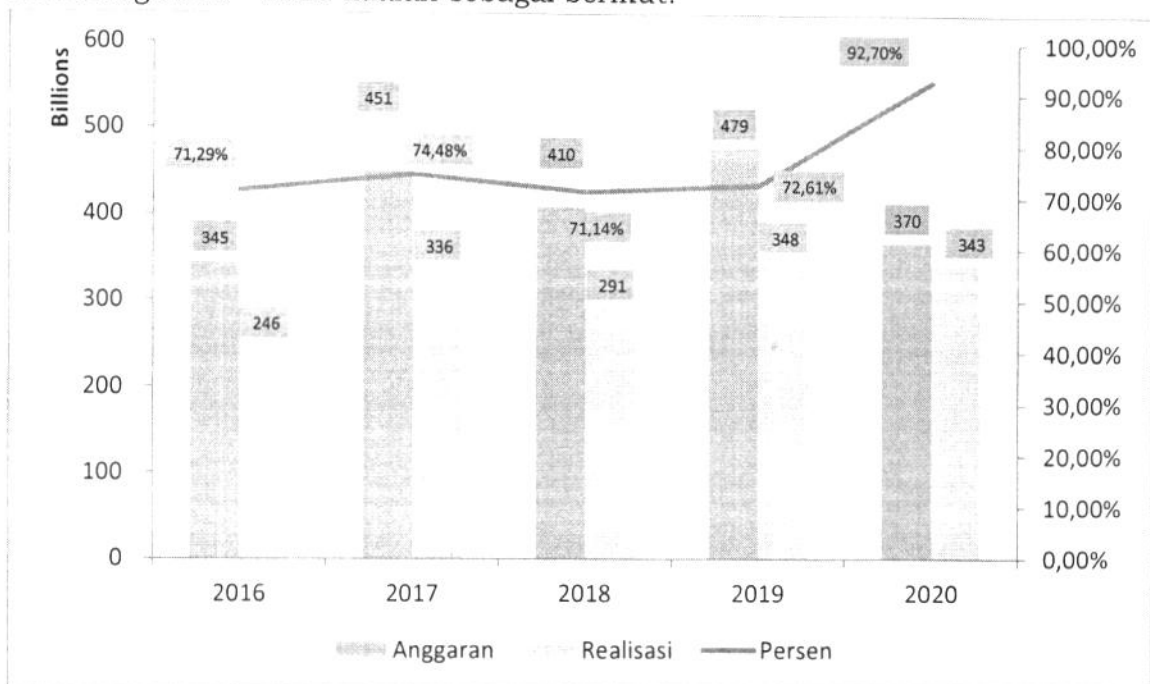


Gambar 3.15. Perkembangan Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2020

Tabel 3.12 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2020

Tahun Anggaran	Anggaran	Realisasi	%	Bertambah /(Berkurang)
2016	1.811.561.575.920	1.596.367.882.331	88,12%	- 215.193.693.589
2017	1.681.057.008.286	1.558.479.332.453	92,71%	- 122.577.675.833
2018	1.793.578.483.281	1.607.665.530.348	89,63%	- 185.912.952.933
2019	1.934.756.686.675	1.753.024.417.372	90,61%	- 181.732.269.303
2020	2.377.205.720.722	1.796.611.175.204	75,58%	- 580.594.545.518

Belanja modal merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan asset tetap dan asset lainnya. Antara lain meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja asset tetap lainnya, dan belanja asset lainnya. Selama periode 2016-2020 belanja modal tumbuh positif secara fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 8,62 persen. Realisasi belanja modal pada tahun 2016 sebesar Rp246.080.497.261,- menjadi Rp. 342.593.987.691,- di tahun 2020. Pertumbuhan ini antara lain didorong oleh pertumbuhan belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, serta belanja asset tetap lainnya. Realisasi belanja modal selama kurun waktu 2016-2020 berkisar antara 71-92 persen, dengan rata-rata realisasi per tahun sebesar 76,44 persen. Rendahnya realisasi belanja modal dibandingkan dengan anggaran disebabkan karena sisa tender (proyek). Perkembangan realisasi belanja modal Kabupaten Pemalang 2016 - 2020 adalah sebagai berikut:



Gambar 3.16 Perkembangan Realisasi Belanja Modal Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2020

Tabel 3.13 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2020

Tahun Anggaran	Anggaran	Realisasi	%	Bertambah / (Berkurang)
2016	345.161.248.080	246.080.497.261	71,29%	- 99.080.750.819
2017	451.272.316.714	336.088.968.940	74,48%	- 115.183.347.774
2018	409.609.492.719	291.381.937.258	71,14%	- 118.227.555.461

Tahun Anggaran	Anggaran	Realisasi	%	Bertambah / (Berkurang)
2019	478.827.131.325	347.657.852.647	72,61%	- 131.169.278.678
2020	369.567.800.913	342.593.987.691	92,70%	- 26.973.813.222

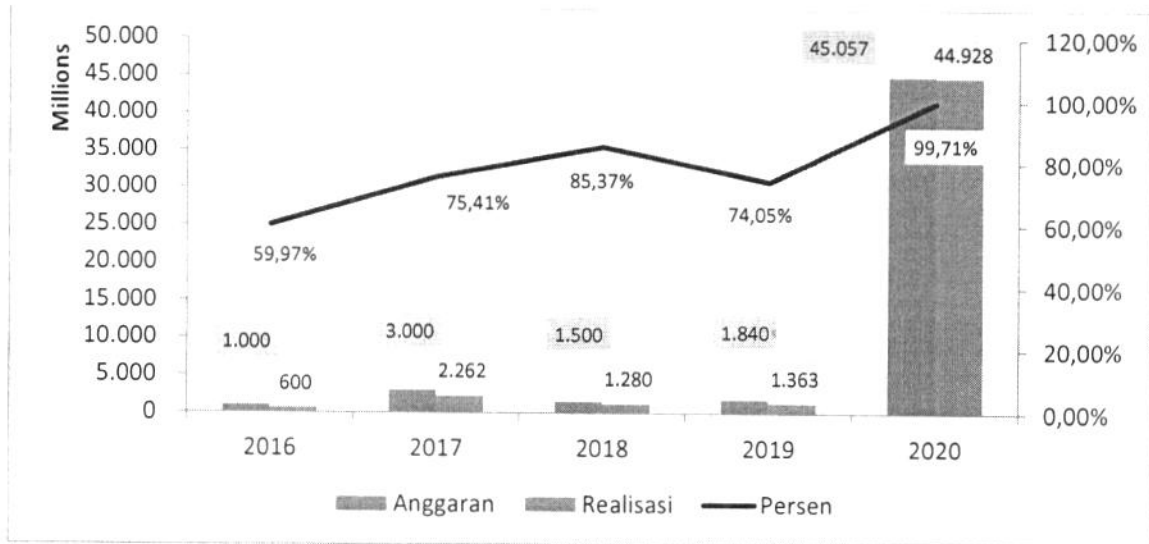
Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi:

- Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
- Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keadaan yang mendesak yang meliputi:

- Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Selama periode 2016-2020 belanja tak terduga meningkat signifikan rata-rata sebesar 194,20 persen per tahun. Pada tahun 2016 realisasi belanja tak terduga sebesar Rp. 599.700.000,-, meningkat menjadi Rp. 44.928.357.830,- di tahun 2020. Peningkatan tajam di tahun 2020 ini disebabkan *refocussing* dan realokasi Belanja Operasi dan Belanja Modal ke Belanja Tidak Terduga untuk penanggulangan Covid-19. Dalam kurun waktu 2016-2020 realisasi belanja tak terduga dibandingkan dengan target anggaran berfluktuasi antara 59,97 - 99,71 persen. Secara rata-rata tingkat realisasi per tahun sebesar 78,90 persen. Secara lengkap perkembangan realisasi Belanja Tidak Terduga ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 3.17 Perkembangan Realisasi Belanja Tak Terduga Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2020

Tabel 3.14 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Tak Terduga Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2020

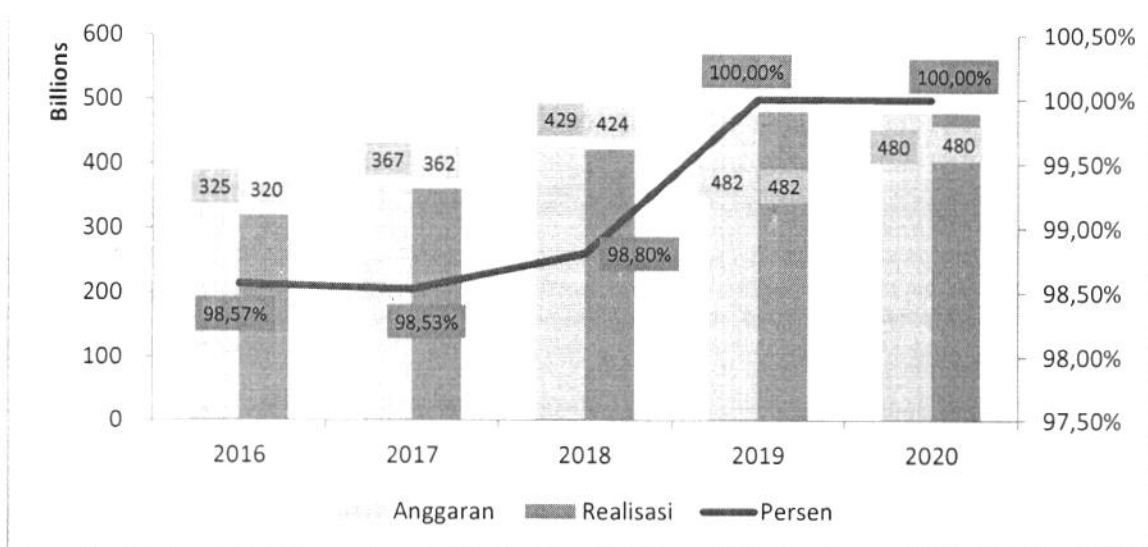
Tahun Anggaran	Anggaran	Realisasi	%	Bertambah / (Berkurang)
2016	1.000.000.000	599.700.000	59,97%	- 400.300.000
2017	3.000.000.000	2.262.214.045	75,41%	- 737.785.955
2018	1.500.000.000	1.280.486.906	85,37%	- 219.513.094
2019	1.840.000.000	1.362.500.000	74,05%	- 477.500.000
2020	45.056.800.000	44.928.357.830	99,71%	- 128.442.170

Belanja Transfer, yaitu pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Terdiri dari:

- a. Belanja Bagi Hasil
- b. Belanja Bantuan Keuangan

Rata-rata pertumbuhan belanja transfer selama jangka waktu 2016-2020 sebesar 10,67 persen per tahun. Realisasi belanja transfer pada tahun 2016 sebesar Rp. 320.088.656.371,- meningkat menjadi Rp. 480.163.138.000,- di tahun 2020. Pertumbuhan positif ini didorong oleh pertumbuhan pada belanja transfer bagi hasil pajak daerah, bagi hasil pendapatan lainnya, bantuan keuangan kepada desa serta bantuan keuangan lainnya. Dibandingkan dengan target anggaran, realisasi belanja transfer selama periode 2016-2020 cukup tinggi, rata-rata berkisar 99,18 persen per tahun. Perbandingan realisasi dan anggaran setiap tahun ditampilkan dalam gambar dan tabel berikut.

f



Gambar 3.18 Perkembangan Realisasi Belanja Transfer Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2020

Tabel 3.15 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2020

Tahun Anggaran	Anggaran	Realisasi	%	Bertambah / (Berkurang)
2016	324.733.651.000	320.088.656.371	98,57%	- 4.644.994.629
2017	366.915.221.000	361.509.357.482	98,53%	- 5.405.863.518
2018	429.093.004.000	423.960.843.500	98,80%	- 5.132.160.500
2019	482.426.099.500	482.426.099.500	100,00%	-
2020	480.172.731.000	480.163.138.000	100,00%	- 9.593.000

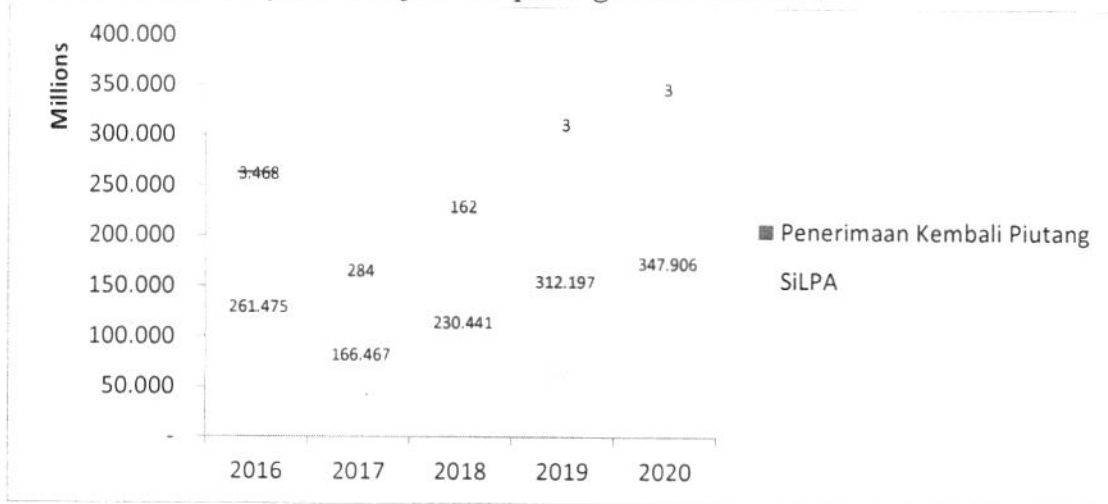
3.1.1.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupu pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari SiLPA; pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan Pinjaman Daerah; penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo; penyertaan modal daerah; pembentukan Dana Cadangan; Pemberian Pinjaman Daerah; pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan. Pembiayaan neto merupakan selisih

f

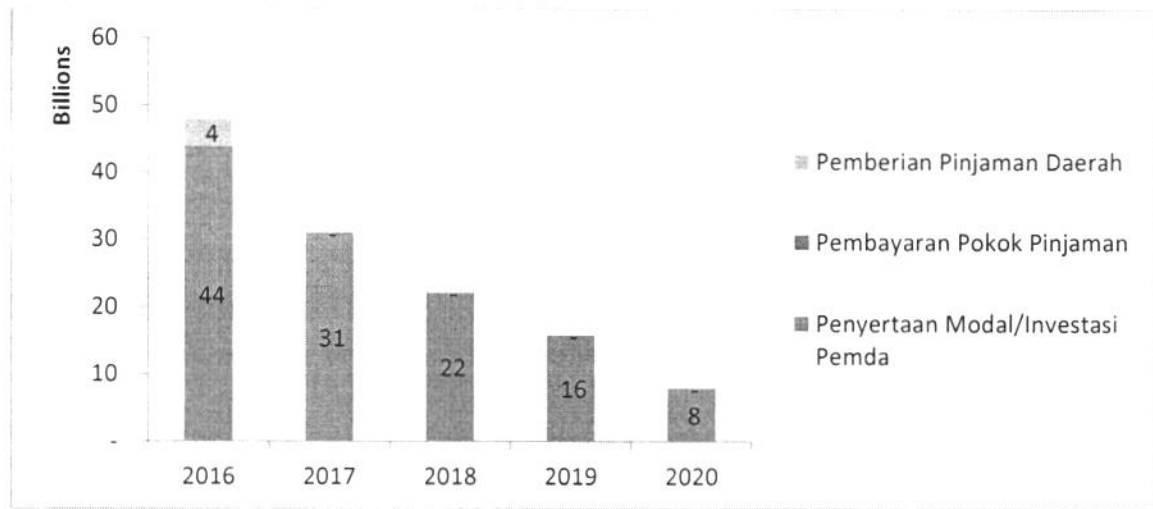
penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan. Pembiayaan neto digunakan untuk menutup defisit anggaran.

Selama periode 2016-2020 Penerimaan pembiayaan mengalami kenaikan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 11,86 persen. Komposisi Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Pemalang terdiri dari penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah (SiLPA) dan Penerimaan Kembali Piutang. Dominasi penggunaan SiLPA dalam penerimaan pembiayaan sangat signifikan dengan kontribusi mencapai 99 persen. Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya selama kurun waktu 2016-2020 mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,40 persen. Tahun 2016 penggunaan SiLPA sebesar Rp. 261.474.785.076,-, meningkat menjadi Rp. 347.908.816.058,- di tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan perencanaan dan penganggaran di Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang masih perlu diperbaiki. Komponen Penerimaan Pembiayaan lainnya adalah Penerimaan Kembali Piutang. Komposisi Penerimaan Pembiayaan ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 3.19 Proporsi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2020

Pengeluaran pembiayaan cenderung menurun selama periode 2016-2020 dengan rata-rata penurunan sebesar 36,06 persen. Pada tahun 2016 pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 47.853.626.551,-, dan terus menurun selama empat tahun berikutnya hingga menjadi Rp. 8.000.000.000,- di tahun 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh penyertaan modal investasi yang cenderung menurun. Penyertaan modal tersebut diperuntukkan untuk menambah modal pada PDAM Tirta Mulia, PDAU Aneka Usaha, Bank Jateng, PD Bank Pemalang, PD BPR BKK Taman dan PD BKK Pemalang. Selanjutnya proporsi pengeluaran pembiayaan daerah disajikan dalam Gambar 3.20 dan Tabel 3.16 berikut.



Gambar 3.20 Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2020

Berdasarkan uraian kinerja pelaksanaan APBD di atas yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah maka rata-rata pertumbuhan APBD Kabupaten Pemalang tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 3.16 berikut ini.

Tabel 3.16 Rata-rata Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2020

NO URUT	URAIAN	REALISASI 2016	REALISASI 2017	REALISASI 2018	REALISASI 2019	REALISASI 2020	Rata2 Pertumbuha n
	SURPLUS / (DEFISIT)	-50.622.455.589	94.690.402.037	103.975.087.691	51.565.974.332	215.967.704.163	
C	PEMBIAYAAN						
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	264.942.785.076	166.750.302.936	230.602.904.973	312.200.341.726	347.908.816.058	7,05%
a	Penggunaan SILPA	261.474.585.076	166.466.702.936	230.440.704.973	312.197.341.726	347.906.316.058	7,40%
b	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0,00%
c	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0	0,00%
d	Penerimaan Kembali Piutang	3.468.200.000	283.600.000	162.200.000	3.000.000	2.500.000	-83,61%
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	47.853.626.551	31.000.000.000	22.176.000.000	15.860.000.000	8.000.000.000	-36,06%
1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0,00%
2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	43.615.000.000	31.000.000.000	22.176.000.000	15.860.000.000	8.000.000.000	-34,56%
3	Pembayaran Pokok Pinjaman	238.626.551	0	0	0	0	-100,00%
4	Pemberian Pinjaman Daerah	4.000.000.000	0	0	0	0	-100,00%
	PEMBIAYAAN NETTO	217.089.158.525	135.750.302.936	208.426.904.973	296.340.341.726	339.908.816.058	11,86%
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	166.466.702.936	230.440.704.973	312.401.992.664	347.906.316.058	123.941.111.895	-7,11%

Tabel 3.17 Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2020

No	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
A	PENDAPATAN DAERAH	2.112.514.280.374	2.353.030.274.957	2.428.263.885.703	2.636.036.843.851	2.448.328.954.562	3,76%
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	275.458.054.016	425.893.266.850	300.481.887.079	350.559.139.753	328.333.366.498	4,49%
a	Pendapatan Pajak Daerah	45.544.391.390	64.270.887.023	76.107.419.624	87.622.428.980	80.569.759.532	15,33%
b	Hasil Retribusi Daerah	26.074.275.115	27.884.961.093	29.878.293.305	39.652.661.431	31.386.762.911	4,75%
c	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	37.153.819.470	15.471.278.657	15.475.375.391	20.220.505.215	21.371.187.915	-12,91%
d	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	166.685.568.041	318.266.140.077	179.020.798.759	203.063.544.127	195.005.656.140	4,00%
2	PENDAPATAN TRANSFER	1.828.008.148.518	1.918.137.008.107	1.977.832.998.624	2.132.625.584.098	1.957.807.388.064	1,73%
a	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	39.469.913.885	33.915.644.126	30.316.210.113	24.594.205.886	34.286.816.480	-3,46%
b	Dana Alokasi Umum	1.197.916.501.000	1.176.872.960.000	1.180.834.332.000	1.223.060.205.000	1.118.791.154.000	-1,69%
c	Dana Alokasi Khusus	270.426.675.208	343.530.726.398	331.768.131.456	350.820.964.140	325.279.262.051	4,73%
d	Alokasi Dana Desa	149.607.350.000	191.002.083.000	249.322.556.000	301.814.036.000	327.255.484.000	21,61%
e	Dana Insentif Daerah	0	0	4.500.000.000	46.648.038.000	10.639.878.000	24,00%
f	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	120.896.166.425	142.831.010.535	150.361.769.055	155.133.792.124	131.194.217.715	2,06%
g	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0,00%
h	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	49.691.542.000	29.984.584.048	30.730.000.000	30.554.342.948	10.360.575.818	-32,43%

No	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	9.048.077.840	9.000.000.000	149.949.000.000	152.852.120.000	162.188.200.000	105,76%
a	Pendapatan Hibah	9.048.077.840	9.000.000.000	149.949.000.000	152.852.120.000	162.188.200.000	105,76%
B	BELANJA DAERAH	2.163.136.735.963	2.258.339.872.920	2.324.288.798.012	2.584.470.869.519	2.664.296.685.725	5,35%
1	BELANJA OPERASI	1.596.367.882.331	1.558.479.332.453	1.607.665.530.348	1.753.024.417.372	1.796.611.175.204	3,00%
a	Belanja Pegawai	1.133.211.267.192	1.075.327.539.055	1.075.400.935.249	1.109.972.944.894	1.129.022.379.192	-0,09%
b	Belanja Barang	410.135.051.496	457.928.343.398	500.092.645.099	583.864.222.478	552.336.992.012	7,73%
c	Belanja Bunga	14.330.850	0	0	0	0	-100,00%
d	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0,00%
e	Belanja Hibah	47.030.617.043	22.684.800.000	27.141.800.000	55.674.250.000	111.212.329.000	24,01%
f	Belanja Bantuan Sosial	5.976.615.750	2.538.650.000	5.030.150.000	3.513.000.000	4.039.475.000	-9,33%
2	BELANJA MODAL	246.080.497.261	336.088.968.940	291.381.937.258	347.657.852.647	342.593.987.691	8,62%
a	Belanja Tanah	1.392.393.450	11.884.647.920	0	2.284.447.918	547.159.229	19,57%
b	Belanja Peralatan dan Mesin	61.826.740.863	57.680.231.826	61.108.708.812	73.396.610.195	66.655.036.324	1,90%
c	Belanja Bangunan dan Gedung	88.997.526.329	144.210.358.951	159.232.219.548	166.805.244.495	222.354.769.440	25,72%
d	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	85.302.120.264	94.178.467.430	45.197.745.443	83.135.501.101	32.026.519.797	-21,72%
e	Belanja Aset Tetap Lainnya	8.561.716.355	28.135.262.813	25.843.263.455	22.036.048.938	20.291.661.621	24,08%
f	Belanja Aset Lainnya	0	0	0	0	718.841.280	0,00%
3	BELANJA TAK TERDUGA	599.700.000	2.262.214.045	1.280.486.906	1.362.500.000	44.928.357.830	194,20%

No	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
a	Belanja Tak Terduga	599.700.000	2.262.214.045	1.280.486.906	1.362.500.000	44.928.357.830	194,20%
4	BELANJA TRANSFER	320.088.656.371	361.509.357.482	423.960.843.500	482.426.099.500	480.163.138.000	10,67%
a	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	4.256.365.204	7.128.202.482	9.265.660.000	9.846.766.000	10.261.739.000	24,61%
(1)	Bagi Hasil Pajak Daerah	3.731.531.001	4.554.438.977	6.235.500.000	6.735.500.000	7.152.180.000	17,66%
(2)	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	524.834.203	2.573.763.505	3.030.160.000	3.111.266.000	3.109.559.000	56,02%
b	Transfer Bantuan Keuangan	315.832.291.167	354.381.155.000	414.695.183.500	472.579.333.500	469.901.399.000	10,44%
(1)	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemda Lainnya			500.000.000	0	0	0,00%
(2)	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	315.141.062.840	353.471.993.000	413.251.676.000	471.670.486.000	468.967.484.000	10,45%
(3)	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	691.228.327	909.162.000	943.507.500	908.847.500	933.915.000	7,81%
C	PEMBIAYAAN DAERAH	217.089.158.525	135.750.302.936	208.426.904.973	296.340.341.726	339.908.816.058	11,86%
I	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	264.942.785.076	166.750.302.936	230.602.904.973	312.200.341.726	347.908.816.058	7,05%
a	Penggunaan SILPA	261.474.585.076	166.466.702.936	230.440.704.973	312.197.341.726	347.906.316.058	7,40%
b	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0,00%
c	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0	0,00%
d	Penerimaan Kembali Piutang	3.468.200.000	283.600.000	162.200.000	3.000.000	2.500.000	-83,61%
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	47.853.626.551	31.000.000.000	22.176.000.000	15.860.000.000	8.000.000.000	-36,06%
a	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0,00%

No	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
b	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	43.615.000.000	31.000.000.000	22.176.000.000	15.860.000.000	8.000.000.000	-34,56%
c	Pembayaran Pokok Pinjaman	238.626.551	0	0	0	0	-100,00%
d	Pemberian Pinjaman Daerah	4.000.000.000	0	0	0	0	-100,00%
	SILPA	166.466.702.936	230.440.704.973	312.401.992.664	347.906.316.058	123.941.111.895	-7,11%

f

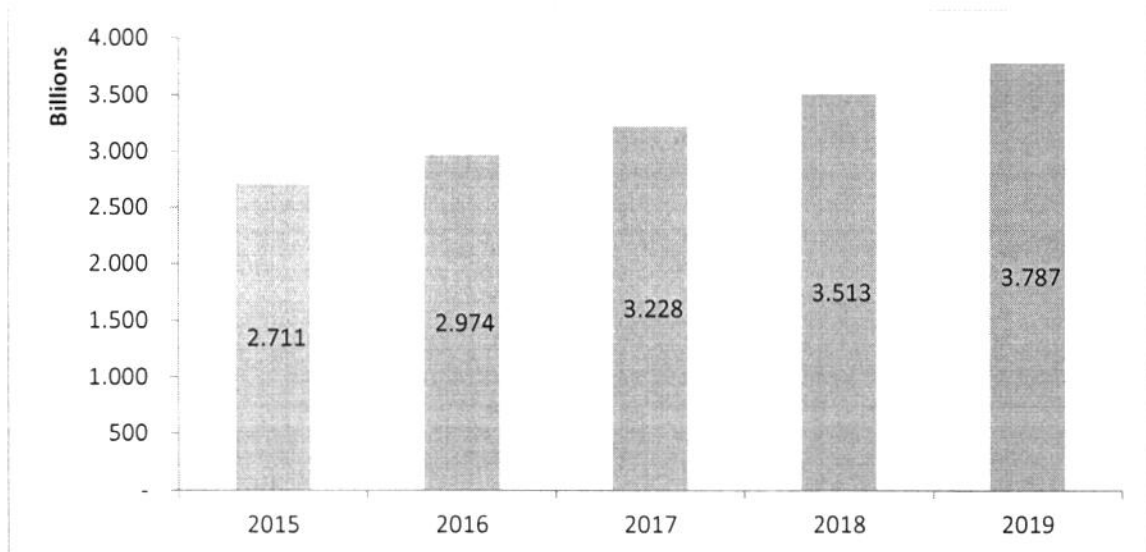
3.1.2. Neraca Daerah

Neraca daerah menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari asset, kewajiban, dan ekuitas. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Neraca Daerah menjadi salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Neraca Daerah sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya untuk memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal pada Pemerintah Daerah, maka selambat-lambatnya Pemerintah Daerah harus membuat laporan keuangan berbasis akrual selambat-lambatnya pada tahun 2015. Laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah menjadi tujuh komponen yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Pada Tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Pemalang menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 14 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi dan pada Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang pertama kali menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal dengan melakukan penyesuaian terhadap kebijakan akuntansi berbasis akrual sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan Tahun Anggaran 2015.

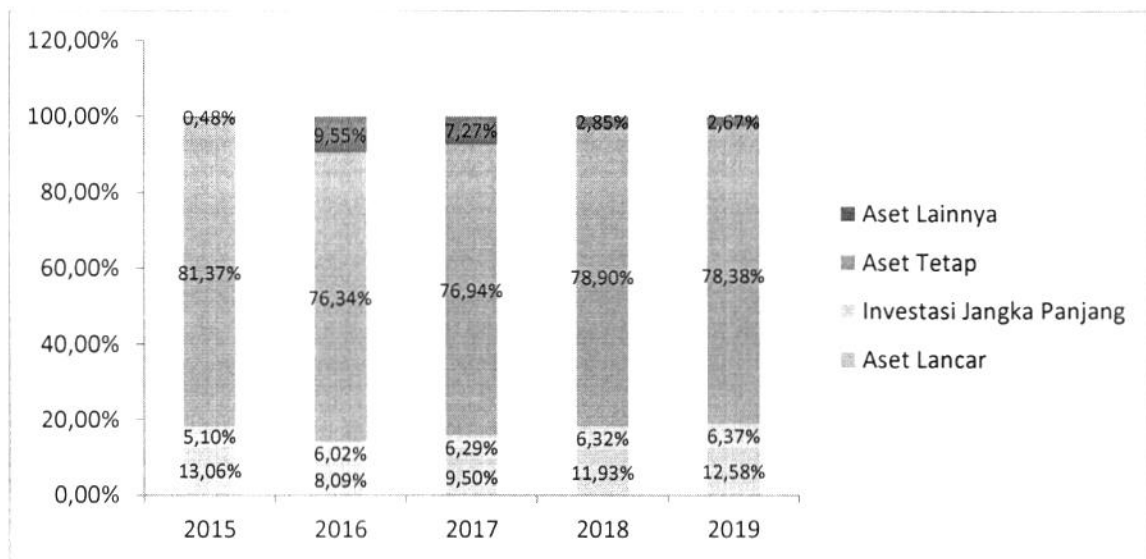
3.1.2.1. Aset

Jumlah aset Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam jangka waktu 2015-2019 mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,71 persen per tahun. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan aset lancar sebesar 11,44 persen, investasi jangka panjang sebesar 14,94 persen, aset tetap 7,70 persen, serta aset lainnya sebesar 8,71 persen yang disebabkan oleh perubahan metode pencatatan berbasis akrual. Nilai aset pada tahun 2015 tercatat sebesar Rp. 2.117.293.161.540,02 meningkat menjadi Rp. 3.786.927.056.410.92 di tahun 2019. Perkembangan asset Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3.21.a Perkembangan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015-2019

Komposisi aset pada Neraca Daerah Kabupaten Pemalang periode tahun 2015-2019 dinominasi oleh aset tetap dengan rata-rata kontribusi per tahun sebesar 78,38 persen, diikuti oleh Aset lancar sebesar 11,03 persen, Investasi Jangka Panjang sebesar 6,02 persen dan Aset Lainnya 4,56 persen. Selebihnya kontribusi masing-masing jenis aset tersebut disajikan dalam gambar berikut.



Gambar 3.21 Komposisi Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015-2019

Aset lancar dalam Neraca Daerah Kabupaten Pemalang selama periode 2015-2019 terdiri dari Kas di Kas Daerah; Kas di Bendaharan Penerimaan; Kas di Bendaharan Pengeluaran; Kas di BLUD; Kas Dana Kapitasi JKN pada FTKP; Kas Dana BOS, Piutang Pendapatan, Piutang Lainnya; Beban Dibayar Dimuka; serta

f

Persediaan. Nilai aset lancar pada tahun 2015 tercatat sebesar Rp. 354.043.166.216,43,-, meningkat menjadi Rp. 476.360.750.865,27 di tahun 2019. Investasi Jangka Panjang terdiri dari investasi non permanen lainnya dan penyertaan modal Pemerintah Daerah. Nilai investasi jangka panjang pada tahun 2015 sebesar Rp. 138.268.580.381,59, menjadi Rp. 241.306.174.125,65 di tahun 2019. Aset Tetap terdiri dari tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, jaringan dan instalasi; aset tetap lainnya; dan konstruksi dalam pengerjaan. Pada tahun 2015 nilai aset tetap tercatat sebesar Rp. 2.206.069.605.719,-, meningkat menjadi Rp. 2.268.248.642.077,- di tahun 2019. Aset Lainnya meliputi tagihan jangka panjang; kemitraan dengan pihak ketiga, aset tidak berwujud; dan aset lain-lain. Nilai aset lainnya sebesar Rp. 12.911.809.223,- di tahun 2019, menjadi Rp. 101.011.489.343,- di tahun 2019.

3.1.2.2. Kewajiban

Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 27,57 persen per tahun. Jumlah kewajiban pada tahun 2015 sebesar Rp. 10.826.693.274,47,- menjadi Rp. 28.676.839.510,23 di tahun 2019. Selengkapnya disajikan pada gambar berikut.

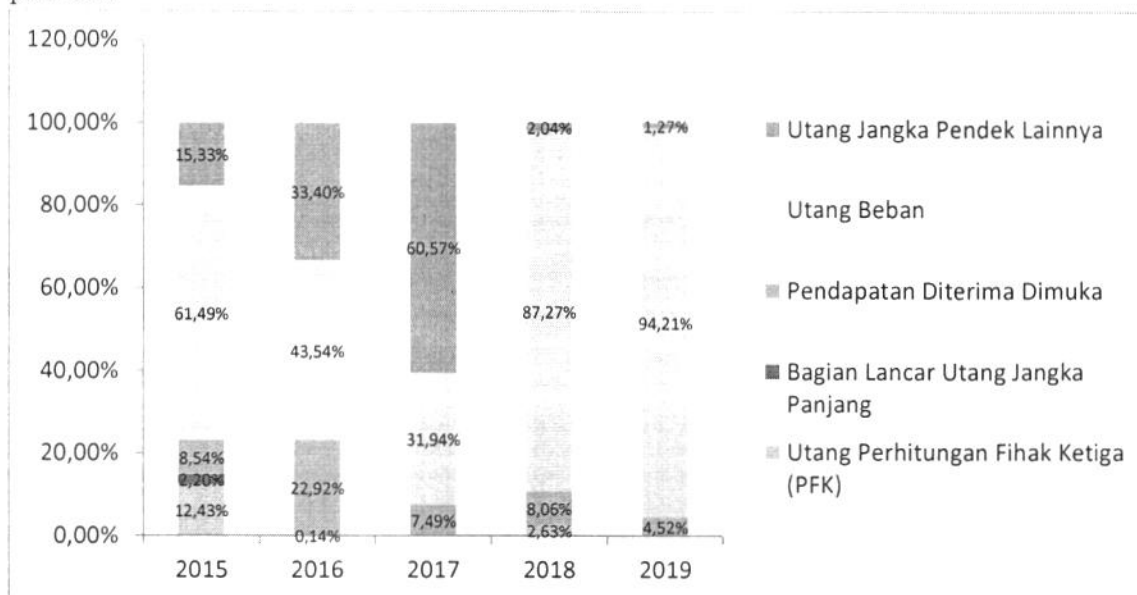


Gambar 3.22.a Proporsi Kewajiban Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2015-2019

Pos kewajiban dikontribusi oleh kewajiban jangka pendek, tanpa adanya pos kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek terdiri dari utang perhitungan pihak ketiga, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima dimuka, utang beban dan utang jangka pendek lainnya. Proporsi Kewajiban ditunjukkan pada gambar 3.22 berikut. Komposisi Kewajiban didominasi oleh Utang Beban dengan rata-rata kontribusi per tahun sebesar 63,69 persen; Utang Jangka Pendek lainnya sebesar 22,52 persen; Pendapatan diterima dimuka sebesar 10,31 persen; Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

f

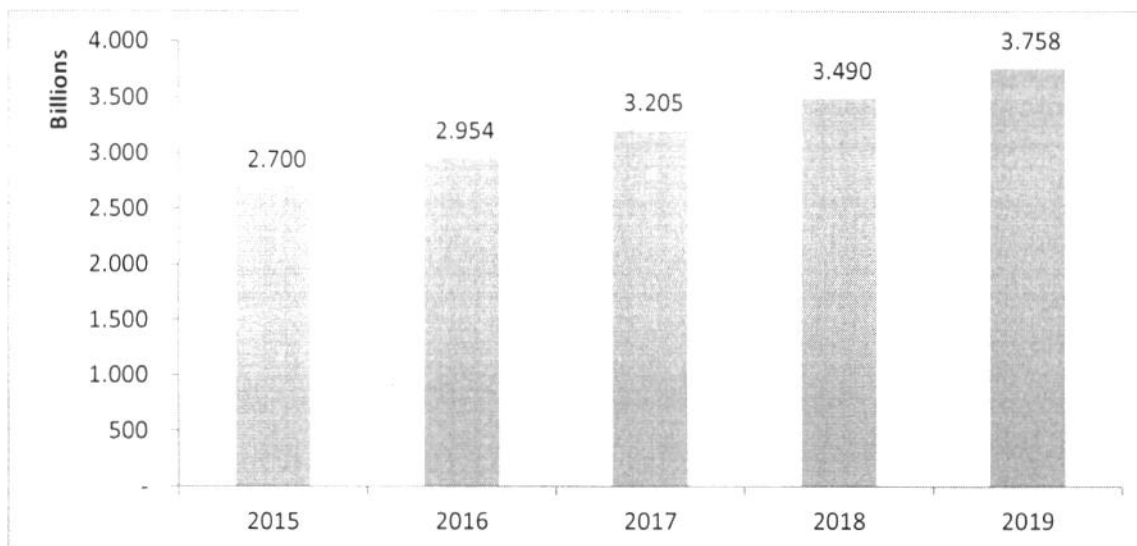
sebesar 3,04 persen serta Bagian Lancar Utang Jangka Panjang sebesar 0,44 persen.



Gambar 3.22 Proporsi Kewajiban Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015-2019

3.1.2.3. Ekuitas

Selama kurun waktu 2015-2019, ekuitas Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang meningkat secara rata-rata sebesar 8,71 persen. Peningkatan ini terdiri dari kenaikan terus menerus ekuitas dari Rp. 2.700.466.468.265,55 di tahun 2015 menjadi Rp. 3.758.250.216.900,69 di tahun 2019. Perkembangan ekuitas selengkapnya ditampilkan pada gambar berikut:



Gambar 3.23 Proporsi Kewajiban Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015-2019

1

Kinerja Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas Pemerintah Daerah dilihat dari hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan RI yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjadi gambaran kinerja akuntabilitas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang. Perkembangan Opini BPK atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pemalang untuk tahun 2016 – 2019 adalah sebagai berikut.

– **Tahun 2016**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2016 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang telah menyajikan laporan keuangan secara wajar untuk semua hal yang material.

– **Tahun 2017**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2017 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang telah menyajikan laporan keuangan secara wajar untuk semua hal yang material.

– **Tahun 2018**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2018 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang telah menyajikan laporan keuangan secara wajar untuk semua hal yang material.

– **Tahun 2019**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2019 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang telah menyajikan laporan keuangan secara wajar untuk semua hal yang material.

1

Tabel 3.18 Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Neraca Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015-2019

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata Pertum- buhan
ASET						
ASET LANCAR						
Kas Di Kas Daerah	208.311.467.121,00	114.738.925.959,00	172.941.136.868,00	253.647.388.847,00	269.764.268.627,00	
Kas Di Bendahara Penerimaan	20.366.000,00	55.500.000,00	52.932.000,00	182.187.855,00	26.306.849,00	
Kas Di Bendahara Pengeluaran	16.036.134,00	27.718.346,00	1.006.387,00	0,00	0,00	
Kas di BLUD	18.734.930.186,00	10.407.616.071,00	10.262.170.531,00	11.528.099.076,00	23.637.755.010,00	
Kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP	34.409.727.370,00	41.264.660.906,00	43.210.784.709,00	45.961.533.563,00	48.465.217.908,00	
Kas Dana BOS	4.862.510.310,00	7.798.044.872,00	3.973.680.865,00	1.630.035.005,00	6.012.767.664,00	
Setara Kas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Piutang Pendapatan	44.559.334.103,41	50.563.187.809,41	63.596.822.105,41	95.147.328.078,51	95.803.712.880,41	
Piutang Lainnya	2.725.694.662,00	3.898.876.322,00	4.676.967.482,00	3.267.852.614,00	16.139.709.956,75	
Penyisihan Piutang	-13.493.069.144,09	-17.259.136.885,72	-24.654.317.718,52	-34.110.079.820,14	-38.990.425.894,73	
Beban Dibayar Dimuka	135.403.910,67	216.010.099,34	129.608.305,87	170.215.592,57	173.636.899,85	
Persediaan	53.760.765.563,44	28.804.797.321,44	32.521.027.323,73	41.536.837.191,26	55.327.800.964,99	
JUMLAH ASET LANCAR	354.043.166.216,43	240.516.200.820,47	306.711.818.858,49	418.961.398.002,20	476.360.750.865,27	7,70%

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata Pertum- buhan
INVESTASI JANGKA PANJANG						
Investasi Jangka Panjang Non Permanen						
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	135.390.000,00	13.110.000,00	13.110.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen	135.390.000,00	13.110.000,00	13.110.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00
Investasi Jangka Panjang Permanen						
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	138.133.190.381,59	179.063.446.883,72	202.855.873.340,65	222.043.311.599,65	241.304.234.125,65	241.304.234.125,65
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen	138.133.190.381,59	179.063.446.883,72	202.855.873.340,65	222.043.311.599,65	241.304.234.125,65	241.304.234.125,65

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata Pertumbuhan
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	138.268.580.381,59	179.076.556.883,72	202.868.983.340,65	222.045.251.599,65	241.306.174.125,65	14,94%
ASET TETAP						
Tanah	922.101.382.500,00	985.525.971.671,00	1.001.267.480.885,00	1.018.566.769.735,00	1.032.636.677.967,00	
Peralatan dan Mesin	289.723.864.734,00	351.664.214.435,00	405.749.453.963,00	464.177.607.297,00	539.761.425.405,00	
Gedung dan Bangunan	989.862.193.484,00	987.056.554.385,00	1.110.002.743.254,00	1.206.330.246.520,00	1.320.680.247.781,00	
Jalan, Jaringan dan Instalasi	683.596.030.700,00	678.004.030.171,00	797.795.196.188,00	957.660.784.112,00	1.054.853.079.242,00	
Aset Tetap Lainnya	48.666.875.562,00	60.597.563.813,00	81.172.202.063,00	104.420.376.331,00	122.511.608.925,00	
Konstruksi Dalam Pengerjaan	13.391.853.176,00	54.279.445.114,00	43.151.327.311,00	78.012.881.840,00	98.899.905.113,00	
Akumulasi Penyusutan	-741.272.594.437,00	-847.148.406.671,00	-955.956.236.271,00	-1.057.776.183.446,00	-1.201.094.302.356,00	
JUMLAH ASET TETAP	2.206.069.605.719,00	2.269.979.372.918,00	2.483.182.167.393,00	2.771.392.482.389,00	2.968.248.642.077,00	7,70%
DANA CADANGAN						
Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASET LAINNYA						
Tagihan Jangka Panjang	691.150.000,00	667.550.000,00	599.760.000,00	583.093.000,00	652.780.500,00	
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	10.432.209.000,00	8.529.500.000,00	8.529.500.000,00	8.529.500.000,00	8.529.500.000,00	

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata Pertum- buhan
Aset Tidak Berwujud	560.462.500,00	4.259.214.462,00	5.282.471.462,00	2.238.552.937,00	3.189.367.494,00	
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		-3.573.758.256,00	-3.935.849.310,00			
Aset Lain-lain	1.227.987.723,00	352.516.101.233,00	293.474.635.950,00	88.762.507.654,00	88.639.841.349,00	
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat		-78.308.328.165,00	-69.162.164.660,00			
JUMLAH ASET LAINNYA	12.911.809.223,00	284.090.279.274,00	234.788.353.442,00	100.113.653.591,00	101.011.489.343,00	67,24%
JUMLAH ASET DAERAH	2.711.293.161.540,02	2.973.662.409.896,19	3.227.551.323.034,14	3.512.512.785.581,85	3.786.927.056.410,92	8,71%
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	1.345.816.062,00	27.718.346,00	206.387,00	593.142.620,00	0,00	
Utang Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	238.626.551,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pendapatan Diterima Dimuka	925.128.233,34	4.500.009.051,81	1.716.295.391,47	1.819.632.278,92	1.295.389.173,23	
Utang Beban	6.657.476.800,00	8.545.861.673,00	7.318.244.132,00	19.692.335.763,00	27.016.615.271,00	

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata Pertumbuhan
Utang Jangka Pendek Lainnya	1.659.645.628,00	6.555.688.358,00	13.878.566.631,00	460.344.626,00	364.835.066,00	
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	10.826.693.274,47	19.629.277.428,81	22.913.312.541,47	22.565.455.287,92	28.676.839.510,23	27,57%
KEWAJIBAN PANJANG						
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUMLAH KEWAJIBAN JK PANJANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUMLAH KEWAJIBAN	10.826.693.274,47	19.629.277.428,81	22.913.312.541,47	22.565.455.287,92	28.676.839.510,23	27,57%
EKUITAS						
EKUITAS						
Ekuitas	2.700.466.468.265,55	2.954.033.132.467,38	3.204.638.010.492,67	3.489.947.330.293,93	3.758.250.216.900,69	
JUMLAH EKUITAS	2.700.466.468.265,55	2.954.033.132.467,38	3.204.638.010.492,67	3.489.947.330.293,93	3.758.250.216.900,69	
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.711.293.161.540,02	2.973.662.409.896,19	3.227.551.323.034,14	3.512.512.785.581,85	3.786.927.056.410,92	8,71%

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kemampuan fiskal daerah (*fiscal capacity*) merupakan faktor yang sangat krusial dalam keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kesejahteraan umum dan pembangunan daerah secara umum. Karena itu, upaya optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan secara terpadu dan sinergi antar Perangkat Daerah pengelola pendapatan daerah.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Belanja pemenuhan kebutuhan merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan. Belanja pemenuhan kebutuhan aparatur digunakan untuk membiayai belanja yang berkaitan dengan operasional aparatur di dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Proporsi besaran belanja pemenuhan kebutuhan aparatur tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan total pengeluaran. Pada tahun 2018 proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur sebesar 47,43 persen, dan pada tahun 2019 turun 0,12 persen menjadi 47,31 persen. Pada tahun 2020 menjadi 44,55 persen. Proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur tahun anggaran 2018-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.19 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun Anggaran 2018-2020

No	Uraian	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	Tahun anggaran 2018	1.112.949.340.047	2.346.464.798.012	47,43%
2	Tahun anggaran 2019	1.230.142.081.943	2.600.330.869.519	47,31%
3	Tahun anggaran 2020	1.190.430.488.074	2.672.296.658.725	44,55%

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Jika Pendapatan Daerah lebih kecil dari Belanja Daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang defisit dan harus ditutupi dengan Penerimaan Daerah. Jika Pendapatan Daerah lebih besar dari Belanja Daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang surplus dan harus digunakan untuk Pengeluaran Daerah. Oleh sebab itu, Pembiayaan

Daerah terdiri Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan bersumber dari:

- a. Selisih Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA).
SiLPA merupakan sumber penerimaan pembiayaan yang berasal dari sisa anggaran tahun lalu yang mencakup penghematan belanja, kewajiban pada pihak ketiga yang sampai pada akhir tahun belum terselesaikan, sisa dana kegiatan lanjutan, dan semua pelampauan atas penerimaan daerah seperti penerimaan asli daerah, penerimaan dana perimbangan, penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, dan penerimaan pembiayaan.
- b. Pencairan dana cadangan.
Pencairan dana cadangan Merupakan sumber pembiayaan yang bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah atau penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi oleh pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari penjualan perusahaan milik daerah/BUMD, dan penjualan aset milik Pemerintah Daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau hasil divestasi penyertaan modal Pemerintah Daerah.
- d. Penerimaan pinjaman daerah.
Penerimaan kembali pemberian pinjaman merupakan sumber pembiayaan yang didapat dari diterimanya kembali sejumlah pinjaman yang telah diberikan kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lainnya.
- e. Penerimaan Piutang Daerah.
Penerimaan piutang daerah merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari pelunasan piutang pihak ketiga seperti penerimaan piutang daerah, pemerintah pusat, pemda lainnya, lembaga keuangan bukan bank atau bank, serta penerimaan piutang lainnya.

Pengeluaran pembiayaan mencakup:

- a. Pembentukan Dana Cadangan, yaitu dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, yaitu sumber pembiayaan yang berupa kegiatan penyertaan modal (investasi).
- c. Pembayaran Pokok Utang, yaitu digunakan untuk menggambarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- d. Pemberian Pinjaman Daerah.

Kebijakan pembiayaan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang selama tahun anggaran 2016-2020 adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan umum penerimaan pembiayaan diarahkan pada perhitungan perkiraan sisa lebih (SiLPA) baik berupa pelampauan pendapatan atas dasar peningkatan kinerja maupun sisa belanja atas asumsi terjadinya efisiensi belanja;
2. Kebijakan umum pengeluaran pembiayaan diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan pengeluaran pembiayaan dalam rangka tambahan modal BUMD.
3. Defisit APBD direncanakan akan diatasi melalui sislisih antara proyeksi penerimaan pembiayaan dengan rencana pengeluaran pembiayaan.

Selama periode 2016-2020 defisit riil pada APBD Kabupaten Pemalang terjadi pada tahun 2016 sebesar Rp. 98.476.082.140,-. Sementara itu pada 2017-2019 terjadi surplus, dan kembali defisit sebesar Rp. 223.967.704.163,- di tahun 2020. Untuk menutupi defisit tersebut dilakukan optimalisasi pembiayaan melalui realisasi Penerimaan Pembiayaan dan realisasi Pengeluaran Pembiayaan. Defisit riil anggaran pemerintah Kabupaten Pemalang selama periode 2016-2020 disajikan dalam tabel 3.21. Sedangkan komposisi penutup defisit riil tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.20 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Pemalang

No	Uraian	Proporsi dari Total Defisit Riil				
		2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
1	Penggunaan SiLPA	100	0	0	0	100
2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
3	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
4	Penerimaan Kembali Piutang	0	0	0	0	0

Perkembangan SiLPA dalam kurun waktu 2015-2019 fluktuatif. Pada tahun 2015 SiLPA sebesar Rp. 261.474.585.076,- menurun menjadi Rp. 166.466.702.936,- di tahun 2016. Dalam tiga tahun berikutnya jumlah SiLPA meningkat terus menerus, hingga menjadi Rp. 347.906.316.058,- di tahun 2019. Komposisi pembentuk SiLPA terbesar adalah sisa penghematan belanja atau akibat lainnya. Sisa penghematan belanja terus menerus meningkat selama kurun waktu 2015-2019 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 115,99 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan perencanaan dan penganggaran di Pemerintah Kabupaten Pemalang masih perlu diperbaiki lagi. Pelampauan penerimaan PAD berkontribusi terhadap SiLPA rata-rata sebesar 11,55 persen. Selengkapnya mengenai perkembangan SiLPA ditampilkan pada tabel 3....

Tabel 3.21 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	2.112.514.280.374	2.353.030.274.957	2.428.263.885.703	2.636.036.843.851	2.448.328.954.562
	Dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	2.163.136.735.963	2.258.339.872.920	2.324.288.798.012	2.584.470.869.519	2.664.296.658.725
3	Pengeluaran pembiayaan daerah	47.853.626.551	31.000.000.000	22.176.000.000	5.860.000.000	8.000.000.000
A	Defisit Riil	- 98.476.082.140	63.690.402.037	81.799.087.691	35.705.974.332	- 223.967.704.163
1	Penggunaan SILPA	261.474.585.076	166.466.702.936	230.440.704.973	312.197.341.726	347.906.316.058
2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
3	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
4	Penerimaan Kembali Piutang	3.468.200.000	283.600.000	162.200.000	3.000.000	2.500.000
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	264.942.785.076	166.750.302.936	230.602.904.973	312.200.341.726	347.908.816.058
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	166.466.702.936	230.440.704.973	312.401.992.664	347.906.316.058	123.941.111.895

Tabel 3.22 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Pemalang Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
		(Rp)	% dari SILPA	(Rp)	% dari SILPA	(Rp)	% dari SILPA	(Rp)	% dari SILPA	(Rp)	% dari SILPA
1	Jumlah SILPA	261.474.585.076	100,00%	166.466.702.936	100,00%	230.440.704.973	100,00%	312.197.341.726	100,07%	347.906.316.058	100,00%
2	Pelampauan penerimaan PAD	21.341.938.865	8,16%	28.778.237.016	17,29%	20.559.335.850	8,92%	25.050.518.079	8,02%	53.431.977.753	15,36%
3	Pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer	- 8.343.004.722	-3,19%	-180.911.023.482	-108,68%	- 33.872.544.893	-14,70%	-21.741.601.376	-6,96%	-18.231.297.902	-5,24%
4	Pelampauan penerimaan Lain-lain Daerah yang sah	6.000.301.660	2,29%	- 27.077.160	-0,02%	- 60.000.000	-0,03%	-	0,00%	- 1.949.472.000	-0,56%
5	Sisa Penghematan belanja atau akibat lainnya	241.966.347.935	92,54%	319.319.739.037	191,82%	243.904.673.080	105,84%	309.492.181.988	99,13%	315.256.758.481	90,62%
6	Pelampauan penerimaan Pembiayaan	334.000.440	0,13%	- 931.799.924	-0,56%	- 4.090.759.064	-1,78%	- 399.106.027	-0,13%	- 601.650.274	-0,17%
7	Sisa pengeluaran pembiayaan	175.000.898	0,07%	238.627.449	0,14%	4.000.000.000	1,74%	-	0,00%	-	0,00%

Pengeluaran Periodik Wajib Mengikat

Realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Selama kurun waktu 2016-2020 pengeluaran wajib dan mengikat menurun dengan rata-rata penurunan per tahun sebesar 2,70 persen. Pada tahun 2016 realisasi pengeluaran wajib dan mengikat sebesar Rp. 998.474.816.649,-. Realisasi ini menunjukkan kecenderungan menurun pada tahun 2017 dan 2018, kemudian meningkat lagi di tahun 2019, meskipun dibandingkan tahun 2016 besarnya lebih rendah yaitu sebesar Rp. 926.628.438.933,-. Kemudian menurun kembali di tahun 2021 menjadi Rp. 891.134.663.167,-. Gambaran tentang realisasi pengeluaran wajib dan mengikat Pemerintah Kabupaten Pematang pada 5 (lima) tahun terakhir, tertuang pada tabel berikut.

Tabel 2.23 Realisasi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				Rata2 Pertumbuha n	
		2016 (3)	2017 (4)	2018 (5)	2019 (6)		2020 (7)
A	Belanja Operasi	993.288.596.567,00	900.307.619.484,00	883.653.308.323,00	915.872.825.433,00	879.939.009.167,00	-2,87%
1	Belanja Pegawai	993.274.265.717,00	900.307.619.484,00	883.653.308.323,00	915.872.825.433,00	879.939.009.167,00	-2,87%
2	Belanja Bunga	14.330.850,00	-	-	-	-	-25,00%
B	Belanja Transfer	4.947.593.531,00	8.037.364.482,00	10.209.167.500,00	10.755.613.500,00	11.195.654.000,00	15,61%
1	Transfer bagi hasil pendapatan	4.256.365.204,00	7.128.202.482,00	9.265.660.000,00	9.846.766.000,00	10.261.739.000,00	26,99%
2	Transfer bantuan keuangan	691.228.327,00	909.162.000,00	943.507.500,00	908.847.500,00	933.915.000,00	8,60%
C	Pembiayaan Pengeluaran	238.626.551,00	-	-	-	-	-25,00%
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	0,00%
2	Pembayaran Pokok Utang	238.626.551,00	-	-	-	-	-25,00%
	Total (A+B+C)	998.474.816.649,00	908.344.983.966,00	893.862.475.823,00	926.628.438.933,00	891.134.663.167,00	-2,70%

3.3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja dan pembiayaan daerah. Kerangka pendanaan keuangan daerah dikelola dengan menganut azas-azas: tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan proyeksi penerimaan daerah dan belanja serta pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama serta belanja tidak mengikat, maka dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan selama 5 tahun kedepan (2022-2026) dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD Kabupaten Pemalang.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan/sub kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik. Peningkatan efektifitas pengelolaan keuangan daerah adalah sebuah tuntutan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan dalam periode 2021-2026.

Pengelolaan Keuangan Daerah yang dimaksudkan meliputi pengelolaan pendapatan, pengelolaan belanja dan pengelolaan pembiayaan. Untuk menghasikan pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan efektif terutama terkait dengan proyeksi peningkatan pendapatan daerah, belanja pemerintah dan defisit

anggaran yang tidak melampaui ambang batas sesuai dengan peraturan yang ada, penetapan asumsi-asumsi yang akurat sebagai dasar rencana pengelolaan keuangan daerah menjadi prasyarat yang harus dipenuhi.

Ada dua asumsi yang digunakan terkait dengan penyusunan rencana pengelolaan keuangan daerah, yaitu: (i) perkembangan ekonomi makro daerah, seperti pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan perkapita dan tingkat inflasi; dan (ii) pokok-pokok kebijakan fiskal daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah, seperti perkiraan PAD, Dana Transfer dan Pendapatan lain-lain yang sah.

b

Tabel 3.24 Asumsi APBD

Indikator	Asumsi										
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk	1.263.271	1.269.077	1.274.475	1.279.596	1.284.236	1.288.566	1.292.573	1.296.272	1.299.432	1.302.812	1.305.668
Laju Pertumbuhan Produk	2,43	5,01	5,32	5,57	5,52	5,58	5,43	5,61	5,7	5,8	
Produk Domestik Regional Bruto(juta Rp) Atas Harga Konstan	11.282.196,1	11.847.199,06	12.477.235,25	13.172.063,6	13.898.669,4	14.673.696,2	15.469.800,6	16.336.984	17.268.888,82	18.270.189,1	18.146.605,06
Inflasi (%)	7,38	2,8	4,04	6,52	7,38	3,52	2,33	3,64	2,95	2,71	1,96
Presentase Penduduk Miskin (%)	19,96	20,68	19,27	19,27	18,44	18,3	17,58	17,37	16,04	15,41	16,02
Tingkat Pengangguran Terbuka	11,45	6,33	4,82	6,55	7,44	6,53	6,53	5,59	6,21	6,5	7,64

3.3.1.1. Kebijakan Pendapatan Daerah 2021-2026

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah satu tahun anggaran (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020). Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Pemalang tahun 2021-2026 diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan dalam struktur APBD Kabupaten Pemalang

Mengingat situasi pandemi yang menyebabkan turunnya pendapatan PAD pada tahun anggaran 2020, maka pada tahun awal pelaksanaan RPJMD 2021-2026 pengelolaan PAD difokuskan upaya pemulihan penerimaan PAD agar kembali kepada kondisi sebelum pandemic/tahun 2019. Dengan asumsi pandemic berhasil dikendalikan pada tahun 2021, maka pemulihan penerimaan PAD diperkirakan bisa tercapai pada tahun kedua/tahun ketiga pelaksanaan RPJMD. Untuk bisa mencapai tujuan yang diharapkan, maka dirumuskan 4 (empat) strategi peningkatan PAD, diantaranya:

1. Pemutahiran Basis Data

Ditujukan untuk mendapatkan data akurat dan terkini dari potensi pajak dan retribusi, termasuk pemetaan celah kesenjangan antara realisasi pendapatan dengan potensi yang seharusnya. Strategi ini dilaksanakan dengan kegiatan studi potensi maupun pemutahiran basis data objek maupun wajib pajak. Data yang dihasilkan juga bisa dijadikan dasar pemetaan, evaluasi dan perumusan alternative perbaikan dan inovasi tata kelola.

2. Penataan Regulasi

Ditujukan untuk menyesuaikan kondisi perkembangan ekonomi terutama pada tarif dan dasar pengenaan pajak/retribusi. Strategi ini juga diarahkan untuk menyusun payung hukum bagi ide-ide perbaikan dan inovasi tata kelola pajak dan retribusi seperti penataan pengelolaan parkir, pengelolaan pasar, elektronifikasi/digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi. Hal ini untuk menjembatani sifat operasi pemerintahan yang harus berlandaskan

pada pengaturan regulasi yang sudah ditetapkan tetapi di sisi lain pemerintahan juga dituntut menghasilkan ide-ide *out of the box* dalam melakukan pelayanan public.

Dengan tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan perkembangan dunia usaha, beberapa tarif retribusi maupun harga dasar pengenaan pajak yang sudah tidak sesuai dengan kondisi terkini akan mengalami penyesuaian. Penataan regulasi juga akan menggali potensi item pajak baru terutama pada retribusi pemakaian kekayaan daerah.

3. Perbaikan dan Inovasi Tata Kelola

Ditujukan untuk meningkatkan pelayanan dan peningkatan penerimaan PAD melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi dan kemudahan pengelolaan PAD. Selain elektronifikasi system pemungutan pajak dan retribusi maka diperlukan penataan/perbaikan tata kelolanya secara menyeluruh. Pengelolaan pajak daerah diarahkan untuk terus meningkatkan kemudahan dan transparansi pemungutan pajak daerah. Pada sektor retribusi perbaikan tata kelola utamanya dilakukan pada beberapa obyek retribusi terbesar dan yang mendapatkan perhatian publik seperti: parkir tepi jalan umum, pelayanan pasar dan pelayanan kebersihan serta retribusi tempat pariwisata/olahraga.

Perbaikan tata kelola juga meliputi pengembangan sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas diiringi dengan pembangunan budaya kerja yang mengedepankan integritas guna membangun *trust/kepercayaan* dari wajib pajak dan retribusi. Salah satu prioritasnya adalah pemenuhan kebutuhan tenaga teknis penilai dan pemeriksa pajak daerah.

4. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi

Ditujukan untuk membangun ekosistem pengelolaan PAD yang terhubung dan saling mendukung peningkatan PAD seperti Konfirmasi Status Wajib Pajak (*Tax Clearance*) antara system perijinan dengan system pajak daerah termasuk penegakkannya oleh petugas penegak Peraturan Daerah. Peningkatan kerjasama dengan pihak lain seperti Kantor ATR BPN, PT Bank Jateng, PT. PLN dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah perlu terus dilakukan dalam upaya peningkatan PAD .

Disamping itu jenis penerimaan PAD dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa penerimaan hasil investasi pada BUMD milik Pemerintah Kabupaten Pemalang maupun milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu dioptimalkan potensinya. Pada BUMD milik Pemerintah Kabupaten Pemalang, pihak eksekutif maupun legeslatif bisa memberikan masukan pada rencana bisnis yang ingin dijalankan terutama pada target laba yang akan menentukan jumlah PAD pada tahun yang akan datang.

3.3.1.2. Kebijakan Belanja Daerah 2021-2026

Pembangunan kedepan membutuhkan suatu perencanaan sistimatis terutama terhadap kerangka pendanaan dan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama lima tahun kedepan.

Berdasarkan proyeksi penerimaan daerah, belanja, pengeluaran pembiayaan yang wajib/mengikat dan prioritas utama serta belanja tidak mengikat, dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah untuk membiayai program/kegiatan selama lima tahun kedepan.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran kedalam program dan kegiatan. Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek *multiplier* yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata.

Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola. Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan 5 tahun ke depan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil).

Kebijakan belanja daerah tahun 2021-2026 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran program prioritas pembangunan daerah, dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif yaitu:

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat (misalnya pemenuhan SPM) dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai indikator keberhasilan pembangunan daerah. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

2. Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan peningkatan infrastruktur terutama jalan; menunjang pencapaian Visi Misi dan program prioritas Dewi (Desa Wisata), Dedi (Desa Digital), Desi (desa Sinergi) dan Koin (Kota Industri); pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini sejalan dengan upaya mendukung prioritas nasional yang antara lain Pembangunan SDM, Pembangunan Infrastruktur, Simplifsi



Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi. Tahun kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.

3. Tolok ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

4. Transparansi dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

3.3.1.3. Kebijakan Pembiayaan 2021-2026

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang diperoleh. Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Penerimaan Pembiayaan bersumber dari SiLPA; pencairan Dana Cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan Pinjaman Daerah; penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo; penyertaan modal daerah; pembentukan Dana Cadangan; Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan pembiayaan daerah 2021-2016 diarahkan pada upaya pengurangan SiLPA melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah.

Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Pengeluaran pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

3.3.1.4. Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022-2026

Berdasarkan kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah di atas, proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2022 - 2026 dapat dilihat pada tabel berikut. Asumsi-asumsi yang digunakan dalam proyeksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian proyeksi PAD 2021-2026 dipengaruhi oleh:
 - a. Faktor Pandemi
Semakin cepat pandemi COVID-19 dapat dikendalikan, maka potensi pencapaian proyeksi PAD akan semakin besar.
 - b. Regulasi Pemerintah Pusat
Terutama dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 sebagai Pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memberikan peluang kewenangan pemerintah pusat untuk melakukan penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Sepanjang penyesuaian dimaksud terbatas pada keringanan dan kemudahan pada keadaan tertentu, tanpa menetapkan penghapusan obyek dan/atau penurunan tarif pajak daerah dan retribusi daerah secara umum, maka potensi pencapaian proyeksi PAD masih terjaga.
 - c. Percepatan Elektronifikasi Pemungutan
Semakin cepat elektronifikasi pada beberapa obyek retribusi seperti retribusi pelayanan pasar, maka potensi pencapaian proyeksi PAD akan semakin besar.
 - d. Percepatan Perbaikan dan Tata Kelola
Semakin cepat dan signifikan perbaikan tata kelola pada beberapa obyek retribusi seperti retribusi pelayanan pasar dan retribusi tempat pariwisata, maka potensi pencapaian proyeksi PAD akan semakin besar.
2. Proyeksi Belanja tahun 2022 - 2026 menggunakan tahun dasar anggaran 2021 dengan asumsi realisasi anggaran tahun tersebut sebesar 100%.
3. Proyeksi Belanja Operasi :
 - Belum memperhitungkan kebutuhan belanja pegawai sebagai dampak dari penyederhanaan birokrasi.
 - Mempertimbangkan pencapaian Visi Agamis melalui pemberian insentif kepada Guru Ngaji.

Tabel 3.25 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022-2026

No	Uraian	Proyeksi				
		2022	2023	2024	2025	2026
4	PENDAPATAN	2.598.246.406.000	2.610.622.139.000	2.627.602.779.000	2.646.312.476.000	2.667.992.412.000
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	345.977.297.000	358.353.030.000	375.333.670.000	394.043.367.000	415.723.303.000
4.1.01	Pajak Daerah	83.252.071.000	87.241.200.000	91.257.400.000	96.455.725.000	103.485.914.000
4.1.02	Retribusi Daerah	36.216.581.000	38.008.422.000	40.967.255.000	43.195.416.000	45.655.309.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.970.490.000	26.049.198.000	28.914.675.000	31.740.494.000	34.662.422.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	202.538.155.000	207.054.210.000	214.194.340.000	222.651.732.000	231.919.658.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.090.080.909.000	2.090.080.909.000	2.090.080.909.000	2.090.080.909.000	2.090.080.909.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.914.625.509.000	1.914.625.509.000	1.914.625.509.000	1.914.625.509.000	1.914.625.509.000
	<i>DBH Pajak/ Bukan Pajak</i>	29.245.189.000	29.245.189.000	29.245.189.000	29.245.189.000	29.245.189.000
	<i>Dana Alokasi Umum</i>	1.107.792.827.000	1.107.792.827.000	1.107.792.827.000	1.107.792.827.000	1.107.792.827.000
	<i>Dana Alokasi Khusus</i>	421.676.494.000	421.676.494.000	421.676.494.000	421.676.494.000	421.676.494.000
	<i>Dana Desa</i>	328.015.879.000	328.015.879.000	328.015.879.000	328.015.879.000	328.015.879.000
	<i>Dana Insentif Daerah</i>	27.895.120.000	27.895.120.000	27.895.120.000	27.895.120.000	27.895.120.000

No	Uraian	Proyeksi				
		2022	2023	2024	2025	2026
4.2.02	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah	175.455.400.000	175.455.400.000	175.455.400.000	175.455.400.000	175.455.400.000
	<i>Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</i>	157.252.400.000	157.252.400.000	157.252.400.000	157.252.400.000	157.252.400.000
	<i>Bantuan Keuangan dari Provinsi</i>	18.203.000.000	18.203.000.000	18.203.000.000	18.203.000.000	18.203.000.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	162.188.200.000	162.188.200.000	162.188.200.000	162.188.200.000	162.188.200.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0
4.3.02	Dana Darurat	0	0	0	0	0
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	162.188.200.000	162.188.200.000	162.188.200.000	162.188.200.000	162.188.200.000
5	BELANJA	2.724.256.887.000	2.756.561.315.000	2.855.175.408.000	2.856.207.278.000	2.900.392.588.000
5.1	BELANJA OPERASI	1.842.375.259.000	1.930.564.789.000	2.024.441.878.000	1.867.426.657.000	1.901.301.016.000
5.1.01	Belanja Pegawai	1.181.241.113.000	1.189.441.716.000	1.197.699.251.000	1.206.014.112.000	1.214.386.698.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	529.784.146.000	609.773.073.000	625.462.627.000	529.887.545.000	555.389.318.000
5.1.03	Belanja Bunga	0	0	0	0	0
5.1.04	Belanja Subsidi	350.000.000	350.000.000	280.000.000	525.000.000	525.000.000

No	Uraian	Proyeksi				
		2022	2023	2024	2025	2026
5.1.05	Belanja Hibah	115.000.000.000	115.000.000.000	185.000.000.000	115.000.000.000	115.000.000.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	16.000.000.000	16.000.000.000	16.000.000.000	16.000.000.000	16.000.000.000
5.2	BELANJA MODAL	366.212.985.000	290.496.755.000	283.509.930.000	437.227.694.000	381.240.609.000
5.2.01	Belanja Modal Tanah	15.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.173.894.000	13.512.556.000	12.545.607.000	40.439.201.000	131.970.930.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	58.725.227.000	31.882.154.000	31.775.584.000	319.461.483.000	169.433.616.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	277.093.000.000	232.058.321.000	224.117.306.000	50.000.000.000	50.000.000.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.220.864.000	8.043.724.000	10.071.433.000	22.327.010.000	24.836.063.000
5.2.06	Belanja Aset Lainnya	0	0	0	0	0
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	5.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000
5.3.01	Belanja Tak Terduga	5.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	510.668.643.000	531.499.771.000	543.223.600.000	547.552.927.000	613.850.963.000
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	11.974.200.000	12.562.300.000	13.358.300.000	14.192.400.000	15.299.600.000
5.4.02	Bagi Bantuan Keuangan	498.694.443.000	518.937.471.000	529.865.300.000	533.360.527.000	598.551.363.000

No	Uraian	Proyeksi				
		2022	2023	2024	2025	2026
	SURPLUS / (DEFISIT)	-126.010.481.000	-145.939.176.000	-227.572.629.000	-209.894.802.000	-232.400.176.000
6	PEMBIAYAAN					
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	166.010.481.000	185.939.176.000	247.572.629.000	229.894.802.000	252.400.176.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	166.010.481.000	185.939.176.000	207.572.629.000	229.894.802.000	252.400.176.000
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0	0	40.000.000.000	0	0
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0	0	0
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	40.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000	20.000.000.000	0	0	0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0	0	0	0	0
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0

No	Uraian	Proyeksi				
		2022	2023	2024	2025	2026
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	0	0	0	0	0
	Pembiayaan Neto (selisih pembiayaan)	126.010.481.000	145.939.176.000	227.572.629.000	209.894.802.000	232.400.176.000
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan (SILPA)	0	0	0	0	0



